

**PENGELOLAAN SUMBER - SUMBER PENDAPATAN DESA DALAM
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN SINJAI SELATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SINJAI**



M A P P I A R E M

4586020350/871133380

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh
Ujian Sarjana Negara Jurusan Administrasi Negara**

Pada

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1991

HALAMAN PENGESAHAN

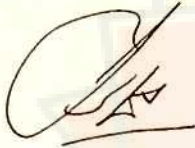
Judul Skripsi : PENGELOLAAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA
DALAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN SINJAI SE-
LATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SINJAI.

Nama Mahasiswa : M a p p i a r e . M

Nomor Stb/Nirm : 586020350/871133380

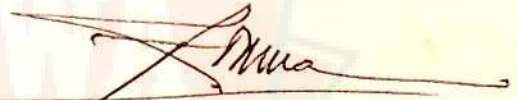
MENYETUJUI

Pembimbing I



(Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS.)

Pembimbing II



(Drs. Ridwan Iskandar)

MENGETAHUI

Dekan Fakultas FISIPOL



(Drs. H. Mohammad Thala)

Ketua Jurusan Adminis-
trasi Negara

FISIPOL UNIVERSITAS
"45"



(Prof. Drs. H. Sadly AD, MPA)

HALAMAN PENERIMAAN

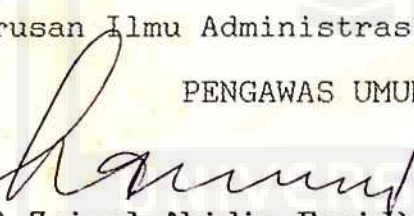
Pada hari/tanggal : Rabu 4 Desember 1991

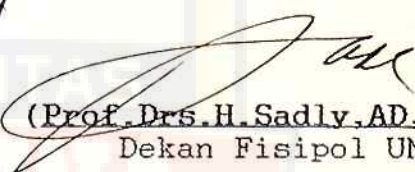
Skripsi Atas Nama : MAPPIARE M.

Nomor Stb/Nirm : 4586020350/871133380

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas "45" Ujung Pandang, Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara.


PENGAWAS UMUM


(Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid)
Rektor Universitas "45"



(Prof. Drs. H. Sadly, AD, MPA)
Dekan Fisipol UNHAS

(Prof. Dr. H. M. Syukur Abdullah)

PANITIA UJIAN


(Drs. H. Mohammad Thala)

K e t u a


(Drs. Guntur Karnaeni)

Sekretaris

TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. H. M. Syukur Abdullah
2. Drs. Thamrin M. Lihawa, MS
3. Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS
4. Drs. A. Farid Ali, SH. MS


(.)


(.)


(.)


(.)

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan Rakhmat-Nya akhirnya penyusunan skripsi ini dapat dirampungkan walaupun melalui berbagai kesulitan-kesulitan dan rintangan. Penulis dengan penuh rendah hati mengakui bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan baik bentuknya maupun isinya.

Namun demikian adalah harapan penulis kiranya skripsi yang sangat sederhana ini dapat berfungsi sebagai suatu sumbangsih kecil terhadap perkembangan pengetahuan pada umumnya maupun pembangunan daerah Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

Atas segalanya ini penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bapak H. Andi Sose, sebagai Presiden Direktur Marannu Group dan sekaligus sebagai pendiri Yayasan Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Bapak Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid, sebagai Rektor Universitas "45" Ujung Pandang dan seluruh pembantu Rektor
3. Bapak Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS dan Bapak Drs. Ridwan Iskandar masing-masing sebagai pembimbing satu dan dua atas kesedianya dorongan, bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Mohammad Thala, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan sekaligus sebagai Dosen

pembina Universitas "45" Ujung Pandang. Begitu pula sege-
staf edukatif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Uni-
versitas "45" Ujung Pandang yang banyak membimbing, mem-
bina mengarahkan dan mendorong selama penulisan skripsi
maupun kuliah sebelumnya di Universitas "45" Ujung Pandang

5. Segenap karyawan Universitas "45" Ujung Padang pada Faku-
tas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya yang telah ba-
nyak membantu selama kuliah sampai kepada selesainya penu-
lisan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pembina Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik dari Universitas Hasanuddin, telah berupaya membi-
na Universitas "45" Ujung Padang.
7. Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Sinjai Selatan dan segenap
pegawai yang telah memberikan izin untuk mengadakan pene-
litian di Kecamatan Sinjai Selatan serta di Desa-Desanya
untuk membantu penulis mengumpulkan data dalam rangka pe-
nulisan skripsi ini.
8. Ayahanda dan Ibunda yang telah memelihara, membesarkan, men-
didik, membiayai, dan mendorong sampai kejenjang perguruan
tinggi. Begitu pula Istri, kakak, adik-adik yang tercinta
adan segenap Keluarga yang begitu banyak memberikan bantu-
annya selama penulis skripsi kuliah di Universitas "45".
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa terutama Drs. Mallarangan
Soppe, Jus Suda, Saiful anam, Sundari, AM, Samsul Bachri
Rakhman yang telah banyak memberikan bantuan selama penu-
lis kuliah di Universitas "45" Ujung Pandang.

Harapan dan doa penulis semoga semua amal bantuan berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis khususnya dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini, akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah Subhahana Wataala. A m i n.

Ujung Pandang, 21 Juni 1991

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAKSI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.	2
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Methodologi Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pengelolaan dan Pembangunan.	12
B. Pengertian Desa	15
C. Sumber-Sumber Pendapatan Desa	17
D. Peningkatan Sumber-Sumber Pendapatan- Desa	29
E. Struktur dan Mekanisme Anggaran Desa.	35
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Riwayat Singkat Wilayah Kecamatan Sin- jai Selatan	40

	B. Geografis Kecamatan Sinjai Selatan. . .	41
	C. Demografis Sinjai Selatan	44
	D. Struktur Organisasi Kecamatan Sinjai Selatan	49
BAB	IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
	A. Pengelolaan Sumber - Sumber Pendapatan Desa	54
	B. Pemanfaatan Sumber - Sumber Pendapatan Desa Dalam Pembangunan.	67
	C. Usaha-usaha Pemerintah Desa Untuk Meng- gali Sumber-Sumber Pendapatan Desa. . .	84
BAB	V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	
	A. Kesimpulan	86
	B. Saran-Saran	87
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	90
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	TEKS	Halaman
01	Penggunaan Tanah di Kecamatan Sinjai Selatan	43
02	Keadaan Tanah di Kecamatan Sinjai Selatan. .	44
03	Jumlah Penduduk di Kecamatan Sinjai Selatan	45
04	Perincian Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Sinjai Selatan	46
05	Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Sinjai Selatan	46
06	Peranan Ibadah Kecamatan Sinjai Selatan. . .	48
07	Penerimaan Sumber-Sumber Pendapatan Desa di Kecamatan Sinjai Selatan	58
08	Distribusi pengeluaran Keuangan Desa di Kecamatan Sinjai Selatan Tahun 1988/1989 . . .	69
09	Distribusi Pengeluaran Keuangan Desa Kecamatan Sinjai Selatan Tahun 1989/1990	73
10	Distribusi Pengeluaran Keuangan Desa Kecamatan Sinjai Selatan Tahun 1990/1991	76
11	Pemanfaatan Sumber-Sumber Pendapatan Desa - Dibidang Prasarana Fisik Kecamatan Sinjai - Tahun 1990/1991	80
12	Pemanfaatan Sumber-Sumber Pendapatan Desa di Bidang Prasarana Sosial Tahun 1990/1991 . .	81
13	Pemanfaatan Sumber-Sumber Pendapatan Desa Pada Pembangunan Lain-lain di Kecamatan Sinjai Selatan Tahun 1990/1991	82

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan sumber pendapatan desa dalam mendukung pembangunan di Kecamatan Sinjai Selatan, dan untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah desa dalam menggali sumber-sumber pendapatan desa di Kecamatan Sinjai Selatan.

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (Field research). Sebelum penelitian dilaksanakan terlebih dahulu penulis melaksanakan tinjauan pustaka (Literatur riviw), untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode survay, sehubungan dengan itu penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu : Observasi yaitu dalam rangka mendapatkan data dan informasi dengan pengamatan langsung pada suatu obyek atau peristiwa dalam hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, kemudian selanjutnya penulis melaksanakan suatu cara pengumpulan data dan informasi dengan mengadakan wawancara kepada tokoh-tokoh/fihak yang dipandang ahli dan dapat memberikan bahan-bahan yang diperlukan, kemudian penulis juga melaksanakan pengumpulan dokumen-dokumen tertulis di kantor desa masing-masing yang dijadikan tempat pengambilan sample penelitian untuk mendapatkan data skunder.

Dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa di Kecamatan Sinjai Selatan sudah cukup mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perencanaan maupun pe-

laksananya sampai kepada pemanfaatannya dalam pembangunan, hanya saja waktu pelaksanaannya biasa berbeda dengan ketentuan yang berlaku, disebabkan oleh kualitas administrasi pemerintahan desa yang masih tergolong rendah.

Melihat sumber pendapatan desa yang ada di Kecamatan Sinjai Selatan maka dapat dikatakan bahwa apabila sumber-sumber pendapatan tersebut dapat digali dan dikelola dengan baik disertai partisipasi masyarakat dan unsur pengelola dapat lebih ditingkatkan kualitasnya, maka sumber pendapatan desa yang ada dapat membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan.

Untuk menggali sumber-sumber pendapatan desa di Kecamatan Sinjai Selatan, para kepala desa melaksanakan usaha usaha tersebut sebagai berikut :

- a. Menambah tanah milik desa dengan jalan membeli lahan baik untuk lahan persawahan maupun untuk lahan perkebunan.
- b. Menyelenggarakan gotong-royong pembangunan seperti pembuatan jalan baru, pembuatan dekker dan perbaikan mesjid.
- c. Mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah tingkat II Sinjai untuk mendapatkan bantuan.
- d. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka membina kesadaran masyarakat desa dalam berpartisipasi dalam pembangunan.
- e. Mengadakan pungutan jempitan rumah tangga setiap minggu (sumbangan beras setiap kepala keluarga).

Sebagai usaha lebih untuk meningkatkan efektifitas

pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa agar dapat mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan kiranya penulis dapat mengemukakan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Agar pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa berhasil dengan baik dalam arti hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat desa perlu adanya partisipasi masyarakat karena hal ini merupakan sumber pendapatan asli desa yang paling banyak diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan desa. Untuk itu disarankan kepada masyarakat agar mau membantu pemerintah desa mensukseskan program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, dengan jalan berpartisipasi terhadap program pemerintah.
2. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam rangka memperkuat pemerintahan desa, perlu diintensipkan usaha-usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang lebih banyak berkaitan dengan aspek administrasi desa bagi seluruh personil pemerintah desa melalui pendidikan dan latihan yang diselenggarakan baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten. Selain dari itu pembinaan dan pengawasan terhadap desa-desa harus lebih teratur waktunya dan diarahkan untuk meningkatkan minat yang lebih besar dan personal pemerintah desa untuk memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kasus-kasus yang tidak diinginkan tidak terjadi.
3. Yang tidak kalah pentingnya dalam usaha meningkatkan pembangunan di desa adalah badan atau lembaga yang ditunjuk

untuk dapat memberikan gambaran dan rekomendasi atau hasil evaluasi untuk waktu tertentu dalam pembangunan desa.



BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah.

Pembangunan nasional yang terus menerus digalakkan oleh pemerintah yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu diantaranya adalah pembangunan dibidang pendapatan desa, yang terutama ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata, sehingga diharapkan mampu mewujudkan derajat kehidupan masyarakat yang optimal. Penggalian sumber-sumber pendapatan desa dan pemanfaatan sumber-sumber tersebut harus diusahakan tanpa merusak lingkungan.

Sejalan dengan hal itu pola dasar pembangunan daerah menggariskan pokok-pokok kebijaksanaan pengelolaan sumber-sumber pendapatan sebagai berikut :

1. Inventarisasi dan evaluasi sumber-sumber pendapatan perlu terus ditingkatkan dengan tujuan untuk lebih mengetahui dan dapat memanfaatkan potensi alam.
2. Menunjang tercapainya tujuan nasional yang meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat yang makin merata dan adil.
3. Mendorong terciptanya pemerataan dan hasil-hasilnya dengan meningkatkan peran serta setiap lapisan masyarakat dalam pembangunan di daerah.

Konsep dan kebijaksanaan di atas sangat strategis sifatnya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan desa

dalam pembangunan, mulai dari tingkat daerah dan terutama sampai kepada tingkat desa. Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila sumber-sumber pendapatan dapat ditingkatkan oleh segenap lapisan masyarakat, mulai dari lapisan masyarakat bawah sampai kepada lapisan masyarakat atas.

Dalam teori organisasi dijumpai adanya seperangkat sumber daya (resources) selain manusia juga diperlukan pula uang, materil, mesin, metode dan waktu yang kesemuanya ini sering pula disebut sumber daya managmen. Diantara semua sumber daya tersebut manusialah yang berperan sebagai pengendali sumber lainnya. Manusia yang dapat menggunakan metode dengan baik. Tetapi sebaliknya, manusia pula yang mungkin merusak hutan dan lingkungan dimana ia berada dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka salah satu upaya pemerintah pusat maupun pemerintah di tingkat daerah sampai kepada di tingkat pedesaan agar dapat turut berpartisipasi dalam meningkatkan peran serta terhadap pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa dengan jalan memberikan rangsangan untuk lebih aktif menggali sumber-sumber pendapatan desa.

B. Perumusan Masalah.

Dalam mewujudkan keikutsertaan pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa dalam pembangunan di Kecamatan sinjai Selatan dapat ditentukan oleh seluruh aparat pemerintahan kecamatan dan khususnya seluruh aparat pemerinta-

han desa sebagai inti pelaksana dan pengelola sumber-sumber pendapatan desa dalam pembangunan, baik fisik maupun pembangunan non fisik.

Demikian pula dalam rangka meningkatkan usaha-usaha pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat untuk ikut serta dalam suatu kegiatan pembangunan pada umumnya dan tidak luput dari berbagai hambatan, kendala, serta tantangan dalam mencapai suatu tujuan pembangunan. Karena yang sudah menjadi tradisi bahwa manusia dalam melakukan tugasnya selalu mendapat atau menghadapi berbagai masalah, baik masalah kecil maupun masalah besar.

Mengenai apa yang terjadi di Wilayah Kecamatan Sinjai Selatan dan bahkan di desa-desanya di mana masyarakat bersifat dan kurang memperhatikan aturan kebijaksanaan pembangunan yang digariskan oleh pemerintah dewasa ini.

Hal yang demikian itu sangat menghambat jalannya pelaksanaan pembangunan terutama di daerah sebab masyarakat dalam keberadaannya merupakan bagian dari pelaksana pembangunan untuk kepentingan masyarakat luas, yang diharapkan mampu memberi dukungan terutama dari segi pelaksanaannya, maupun manfaat tersebut. Hal inilah merupakan suatu hambatan yang harus segera dipecahkan bersama agar pembangunan berjalan dengan baik.

Adapun masalah yang dirumuskan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Apakah pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa dapat

mendukung pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sinjai Selatan ?

- b. Usaha-usaha apakah yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menggali sumber-sumber pendapatan desa di Kecamatan Sinjai Selatan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan diadakan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sinjai Selatan.
- b. untuk mengetahui usaha-usaha apakah yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menggali sumber-sumber pendapatan desa di Kecamatan Sinjai Selatan.

2. Kegunaan penelitian ini adalah diharapkan sebagai berikut.

- a. sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kecamatan Sinjai Selatan khususnya kepala desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan desa atau mengambil keputusan yang menyangkut sumber-sumber pendapatan desa.
- b. untuk mendorong pada penelitian-penelitian lainnya untuk melaksanakan penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa pada umumnya di Kecamatan Sinjai Selatan dan khususnya di desa-desa.

D. Methode Penelitian.

Sudah menjadi suatu ketentuan bahwa untuk memperoleh

data dalam rangka penulisan karya ilmiah, seharusnya kita menggunakan metode penelitian yang ilmiah agar data yang diperoleh lebih objektif dan sistematis.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode survey. Sehubungan dengan itu penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :

1. Library Research (penelitian kepustakaan).

Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data atau informasi melalui pembacaan buku serta karya tulis pada sarjana mengenai teori-teori yang relevan dengan masalah.

2. Field Research (penelitian lapangan).

Dengan metode ini di maksudkan untuk mendapatkan data informasi dengan jalan penelitian lapangan, dimana penulis melaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Observasi.

Penggunaan ini adalah dalam rangka mendapatkan data dan informasi serta mengamati langsung pada suatu obyek atau peristiwa mengenai hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Interwiew.

Yaitu suatu cara pengumpulan data dan informasi dengan mengadakan wawancara kepada tokoh-tokoh/pihak yang dipandang ahli dan dapat memberikan bahan-bahan yang diperlukan.

c. Pengumpulan dokumen-dokumen yaitu penulis memeriksa, mencatat, dokumen-dokumen tertulis di kantor desa masing-masing untuk mendapatkan data skunder.

3. Populasi dan Sample Penelitian.

Dalam penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa tempat penelitian skripsi ini dilaksanakan di desa-desa di Kecamatan Sinjai Selatan.

Adapun jumlah desa di Kecamatan Sinjai Selatan sebanyak 10 desa dan 1 Kelurahan. Desa dan Kelurahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Sangiasseri
2. Desa Saotengah.
3. Desa Mannanti.
4. Desa Kalobba.
5. Desa Tellulimpoe.
6. Desa Aska.
7. Desa Songing.
8. Desa Puncak.
9. Desa Talle.
10. Desa Palae.
11. Desa Bulukkamase.

Karena judul penelitian skripsi adalah pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa di Kecamatan Sinjai Selatan demikian pula populasi penelitian adalah para aparat desa dan anggota LKMD.

Untuk mendapatkan sample penelitian diambil 4 buah

desa dipilih secara provosip smpling (sampel penelitian) sebagai sampel wilayah. Mengenai jumlah responden yang dipilih ialah sebanyak 40 orang sebagai responden.

Adapun perincian untuk mendapatkan sampel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Desa Saotengah diambil sampel sebanyak :

a. Kepala	Desa	1 orang.
b. Sekretaris	Desa	1 orang.
c. Aparat	Desa	4 orang.
d. Anggota	LKMD	4 orang.
		<hr/>
		10 orang.

2. Desa Mannanti diambil sampel sebanyak :

a. Kepala	Desa	1 orang.
b. Sekretaris	Desa	1 orang.
c. Aparat	Desa	4 orang.
d. Anggota	LKMD	4 orang.
		<hr/>
		10 orang.

3. Desa Kalobba diambil sampel sebanyak :

a. Kepala	Desa	1 orang.
b. Sekretaris	Desa	1 orang.
c. Aparat	Desa	4 orang.
d. Anggota	LKMD	4 orang.
		<hr/>
		10 orang.

4. Desa Tellulimpoe diambil sampel sebanyak :

a. Kepala	Desa	1 orang.
b. Sekretaris	Desa	1 orang.

c. Aparat Desa 4 orang.

d. Anggota LKMD 4 orang.

10 orang.

Jadi jumlah keseluruhan sampel penelitian skripsi ini adalah sebanyak 40 orang.

4. Kerangka Konseptual.

Sesuai dengan kedudukan desa sebagai basis pembangunan maka untuk dapat tumbuh dan berkembang diperlukan suatu landasan yang kuat bagi kelancaran pembangunan yang semakin meningkat dan tersebar secara merata keseluruh pelosok tanah air. Untuk maksud tersebut melalui ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) Nomor IV/MPR/1988 antara lain ditegaskan bahwa Pemerintah desa perlu diperkuat agar semakin mampu menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa yang semakin meluas dan efektif.

Sebagai pelaksanaan dari pada Ketetapan MPR tersebut dan tindak lanjut pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Pemerintah bersama-sama DPR-RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan desa yang merupakan dasar bagi penyeragaman dan menjamin terwujudnya Demokrasi secara nyata.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ditegaskan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat

dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, pemerintah Desa adalah segenap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dalam rangka menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat desa. Keseluruhan kegiatan pemerintahan desa bersumber pada wewenang pemerintah desa (baik sebagai perpanjangan dari pada satuan pemerintahan di atasnya maupun sebagai alat desa), yang ditentukan berdasarkan pranata-pranata hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan desa, sedang ruang lingkup operasionalnya meliputi seluruh wilayah desa, dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Sehubungan dengan hal itu dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 antara lain ditegaskan bahwa pemerintah Desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- b. menyelenggarakan dan menanggung jawab terutama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. Menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan kesejahteraan dan ketentraman dan ketertiban.
- d. Membutuhkan dan mengembangkan jiwa/semangat gotong-royong yang dikalangan masyarakat sebagai sendi utama dalam pelaksanaan pemerintah desa", (Drs. Suwignjo, 1985).

Untuk menunjang pelaksanaan hak, wewenang dan kewajiban pemerintah desa tersebut diatas, dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ditetapkan sumber-sumber pendapatan desa tersebut adalah sebagai berikut

1. Sumber-sumber pendapatan asli desa terdiri dari

- a. Hasil tanah-tanah milik desa.
 - b. Hasil dari Swadaya dan partisipasi masyarakat desa.
 - c. Hasil dari gotong royong masyarakat.
 - d. Lain-lain hasil usaha desa yang sah.
2. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terdiri dari :
- a. Sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat.
 - b. Sumbangan dan bantuan dari pemerintah daerah.
 - c. Sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diserahkan kepada desa.
3. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Selanjutnya agar penyelenggaraan pemerintah desa berlangsung dengan tertib, efisien dan efektif serta sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka setiap tahun kepala desa menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dalam Lembaga Musyawarah Desa" (Drs. Suwignjo, 1985 : 11).

E. Sistematika Penulisan.

Penulisan Judul skripsi ini dibagi dalam lima bab. Kelima bab tersebut dibahas secara beraturan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, mengemukakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, mengemukakan beberapa pengertian pokok dengan maksud menyajikan landasan teori yang akan digunakan dalam pembahasan bab-bab berikutnya. Beberapa sub bab menyajikan pengertian pengelolaan dan pembangunan, pengertian desa sumber-sumber pendapatan desa, peningkatan sumber-sumber pendapatan desa, dan struktur dan mekanisme

anggaran desa.

Bab Ketiga, mengemukakan gambaran umum lokasi penelitian, riwayat singkat tentang wilayah kecamatan Sinjai Selatan, geografi Kecamatan Sinjai Selatan, demografi Kecamatan Sinjai Selatan, dan struktur organisasi Kecamatan Sinjai Selatan.

Bab Keempat, mengemukakan pembahasan hasil penelitian, pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dalam pembangunan, usaha-usaha pemerintah desa untuk menggali sumber-sumber pendapatan desa.

Bab Kelima, adalah sebagai bab penutup yang mengemukakan beberapa kesimpulan, dari pembahasan sebelumnya dan saran-saran bagi upaya penyempurnaannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengelolaan dan Pembangunan.

Karena pengelolaan yang digunakan dalam tesis ini, pengertian adalah pengurusan, menurut dalam kamus umum bahasa Indonesia itu dalam pengertiannya bahwa pengelolaan berasal dari kata " kelola " (mengola) yang artinya sama dengan mengurus (dalam hal pemerintahan, perusahaan) dan sebagainya. Mengelola juga punya arti sama dengan melakukan (pekerjaan) disamping itu "pengelola" diartikan sama dengan pengurus atau penyelenggaraan, jadi pengelolaan, dapat diartikan sama dengan penyelenggaraan atau pengurusan. Dengan demikian sumber-sumber pendapatan desa.

Menurut pasal I Peraturan Menteri Dalam Negeri No I tahun 1982 tentang sumber-sumber pendapatan desa, pengurusan dan pengasannya dijelaskan bahwa :

"Pengurusan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa yang selanjutnya disebut pengurusan adalah pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa dengan baik".
(Drs. Suwignjo 1985 : 117).

Dalam istilah ilmiah pengelolaan biasanya disebut managmen, dimana managmen itu mempunyai unsur-unsur yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun pengertian perencanaan yang dikemukakan oleh Prof.DR. S.P. Siagan, MPA dalam bukunya filsafat Administrasi dikatakan bahwa :

"Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa akan datang dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan" (Y. Direr : 142:1961).

Pendapat lain tentang perencanaan dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjoyo dalam bukunya perencanaan pembangunan merumuskan defenisi perencanaan sebagai berikut :

"Perencanaan adalah meliputi proses kegiatan usaha yang terus-menerus secara menyeluruh dari penyusun suatu rencana, penyusunan program kegiatan pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaannya" (Prof. DR. Bintoro, Tjokroamidjoyo : 17 : 1980).

Berdasarkan defenisi perencanaan dan pengelolaan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan dengan perencanaan dalam hubungannya pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa adalah proses kegiatan dalam menentukan dan mengurus jenis-jenis pendapatan suatu desa, sehingga dapat menghasilkan suatu uang atau benda yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan suatu desa dalam satu tahun anggaran.

Adapun mengenai defenisi pembangunan yang dikemukakan sebagai berikut :

"Pembangunan adalah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perobahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa" (Prof. DR. S. P. Siagian, MPA : 54 : 1985).

Lihat beberapa pengertian penting yaitu :

1. Bahwa pembangunan merupakan suatu proses.
2. Bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilakukan.

profil geografi pafrom 9

- Jelaskan desa cinta lingkungan
- Jelaskan desa wisata
- Jelaskan desa perikanan
- Jelaskan desa industri
- Jelaskan desa pariwisata
- Jelaskan desa perikanan
- Jelaskan desa industri
- Jelaskan desa pariwisata

3. Bahwa pembangunan dilakukan secara berencana.
4. Bahwa pembangunan kepada modernitas.
5. Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi dimensional.
6. Hal-hal tersebut di atas dilakukan dengan tujuan kepada usaha-usaha ^{perbaikan} membina bangsa yang terus-menerus dilakukan kepada tujuan bersama.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam GEHN (Garis Besar Haluan Negara) disebutkan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini mengandung pengertian adalah sebagai berikut :

1. Ada keselarasan, keserasian, keseimbangan dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan, bahwa pembangunan adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan, maka meskipun pembangunan ekonomi menduduki tempat utama dalam pembangunan nasional dewasa ini dan didalam jangka panjang, unsur manusia, unsur sosial budaya, dan unsur lainnya, mendapat perhatian yang seimbang.
2. Pembangunan merata untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah tanah air.
3. Yang ingin dibangun adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia dan masyarakat yang tetap berkepribadian Indonesia pula (GEHN, 12:1978).

Dengan pengertian pembangunan di atas adalah merupakan suatu usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir bathin secara adil dan merata,

oleh karena itulah sebaliknya berhasilnya pembangunan tergantung pula kepada partisipasi seluruh rakyat Indonesia.

B. Pengertian Desa.

Apa yang dimaksud dengan desa atau lebih tegas lagi definisi tentang desa, sampai sekarang masih belum pemulis menjumpai satupun batasan yang dapat memenuhi syarat definisi secara umum belum ada arti sebuah pun yang dapat ditetapkan untuk semua macam kepentingan. Maka oleh karena itu dapat dikemukakan perbedaan yang nyata antara beberapa segi pandangan.

Dari segi geografis maka Prof.DR. Bintoro mendefinisikan desa sebagai berikut :

"Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur geografis sosial ekonomis, politik dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain". (Drs. I. Nyoman Baratha, 1985 : 26).

Berdasarkan definisi di atas maka yang dimaksudkan desa adalah perwujudan geografis atau perwujudan penduduk yang timbul sebagai akibat unsur-unsur kegiatan fisiografis sosial ekonomis, politis dari suatu daerah kedaerah yang lainnya.

Dari segi pergaulan hidup maka Dr.P.J.Eourman mengemukakan definisi bahwa :

"Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama seberapa ribu orang hampir semuanya saling mengenal kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, kepada tradisi

kaidah-kaidah sosial" (Drs I. Nyoman Baratha, 1985:26).

Lebih lanjut dinyatakan, bahwa desa-desa atau nama aslinya yang setingkat adalah :

- "a. Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut adat kebiasaan setempat menurut peraturan negara atau peraturan daerah yang berlaku;
- b. Desa wajib melaksanakan tugas kewenangan yang diberikan oleh pemerintah dan daerah;
- c. Untuk melaksanakan tugas kewenangan tersebut kepala desa dapat diberikan atau bantuan ".(Drs. I. Nyoman Baratha, 1985:28).

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas maka jelaslah bahwa kehidupan desa berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya baik menurut adat maupun menurut peraturan pemerintah dan daerah. Kemudian berdasarkan peraturan tersebut desa wajib melaksanakan kewenangannya yang diberikan baik pemerintah pusat maupun daerah. Untuk melaksanakan tugas kewenangan tersebut kepala desa dapat diberikan sumbangan atau bantuan yang biasa disebut sumber pendapatan desa yang berasal dari pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas kewenangan kepala desa tidak mencukupi apabila hanya mengharapkan dari sumbangana atau bantuan pemerintah. Oleh karena itu diperlukan sumber dana yang lain untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Sumber dana yang dapat diperoleh kepala desa untuk menjalankan tugas kewenangannya adalah pengelolaan sumber-sumber pendapat asli desa. Untuk mengetahui sumber pendapat desa akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan topik berikut ini.

C. Sumber-sumber Pendapatan Desa.

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai hak dan kewajibannya memerlukan sumber pendapatan pendapatan untuk dapat digali dan ditingkat. Hal itu disebabkan kemampuan pengelolaan keuangan yang dikuasai desa mempunyai pengaruh terhadap masalah penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam penyelenggaraan rumah tangga desa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang pemerintahan desa dan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, tentang sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya telah menetapkan/jenis sumber pendapatan desa. Tindak lanjut dari peraturan tersebut di daerah masih dalam proses penyusunan, sehingga sementara ini penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan cenderung dilaksanakan sesuai dengan tradisi dan kebiasaan yang telah ada pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh tipe kepemimpinan kepala desa. Mengenai sumber pendapatan desa dapat kita kemukakan yaitu segala jenis pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dimiliki oleh desa.

Mengenai pengertian sumber-sumber pendapatan desa tersebut diatas menurut pendapat penulis agak terbatas karena hanya memfokuskan pada sumber-sumber yang dimiliki oleh desa atau terdapat dalam desa dibawah pengelolaannya.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas lebih lanjut dijelaskan mengenai sumber-sumber pendapatan desa tersebut

dapat timbul karena disebabkan sesuatu hal sebagai berikut

1. Tradisi dan atau kebiasaan yang telah melembaga.
2. Berdasarkan pelaksanaan tugas-tugas dari pemerintah lebih atas.

Dalam hubungan ini pemerintah desa diberi kepercayaan oleh pemerintah di atasnya untuk mengelola, bangunan proyek tertentu yang mendatangkan penghasilan bagi desa kendatipun proyek tersebut milik instansi pemerintah.

3. Berdasarkan atas azas pelaksanaan tugas pembangunan pemerintah desa mendapat bantuan pembiayaan tingkat lebih atas (pemerintah pusat, daerah tingkat I, daerah tingkat II) untuk melaksanakan kegiatannya.

Untuk mengetahui lebih jelas yang dimaksudkan sumber-sumber pendapatan desa dibawah ini disebutkan sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor I Tahun 1982, tentang sumber-sumber pendapatan desa pengurusan dan pengawasannya, disebutkan bahwa :

1. Pendapatan Asli Desa.

Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang bersumber dari desa sendiri yang terdiri dari :

- a. Kekayaan desa.
- b. Hasil Swadaya dan partisipasi masyarakat desa.
- c. Hasil gotong royong masyarakat desa.
- d. Pungutan desa.
- e. Lain-lain dari usaha desa yang syah, usaha ekonomi desa, lumbung desa, yang berasal dari bantuan desa". (Drs. Suignjo, 1985 : 207).

- a). Kekayaan Desa.

Kekayaan desa terdiri dari

1. Tanah Kas Desa.

Tidak semua desa memiliki tanah kas desa, hanya dimiliki oleh sebagian desa di Indonesia terutama di Jawa. Tanah kas desa tumbuh berdasar atas tradisi/adat istiadat yang berkembang dan hidup dikalangan masyarakat. Hasil dari Tanah desa dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan rumah tangga desa, termasuk tunjangan kepala desa dan perangkatnya. Besarnya tunjangan diberikan kepala desa beserta perangkatnya berbeda pada semua desa. Hal ini disebabkan tidak semua desa memiliki luas dan jenis tanah yang sama. Nama tanah desa untuk kepala desa dan perangkatnya antara lain : Tanah Bengkok, Tanah Lunggu, Tanah Pengaren-Aren dan Tanah Pecatuh. Tanah tersebut adalah tanah jabatan terakhir setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala desa. Kepala desa dan perangkatnya yang mengalami masa pensiun mendapat tanah desa yang disebut Penaren aren sejenis pensiunan. Disamping tanah yang dipergunakan bagi kepala desa dan perangkatnya terdapat pula tanah khusus untuk penyelenggaraan pemerintahan yaitu tanah titisara.

Tanah tersebut dikerjakan oleh warga desa dengan sistem bagi hasil atau diperuntukkan keperluan lain yaitu sistem lelang. Pada umumnya sistem tanah bengkol dan tanah titisara hanya terdapat di

pulau Jawa, sedang diluar pulau Jawa tidak diketemukan atau tidak ada. Dengan demikian tanah kas desa merupakan suatu masalah yang baru sehingga memerlukan penjelasan atau penyuluhan untuk masyarakat sistem tersebut. Ditinjau dari potensi wilayah tanah kas desa mungkin sekali direalisasikan di desa-desa diluar pulau Jawa. Diluar pulau Jawa hanya disebut tanah adat atau tanah suku. misalnya tanah negeri di Sumatera Barat. Dengan perubahan status, bukan "Nagari" yang menjadi desa tetapi "Jorong" maka tanah desa akan menjadi permasalahan yaitu bahwa Jorong tidak mendapat sumber pendapatan dari Nagari, karena sumber pendapatan Nagari adalah menurut adat yang tidak dapat dipecah-pecah.

Dengan demikian maka desa harus mencari sumber-sumber pendapatan desa yang berasal dari tanah desa maka kepala desa dan perangkatnya hanya mendapat tunjangan penghasilan dari pemerintah pusat yang jumlahnya sangat tidak memadai. Tingkat penghasilan yang diperoleh aparat pemerintah desa menentukan insentitas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehubungan penghasilan diperoleh masih sangat rendah (dari dana tunjangan penghasilan pamong desa) dan mata pencaharian aparat pemerintah desa umumnya sebagai petani, maka kegiatan penyelenggaraan pemerintahan

desa berkaitan dengan banyaknya kegiatan penduduk dibidang pertanian. Pada saat kegiatan penduduk sangat meningkat (seperti musim tanam dan panen). Keadaan ini membawa akibat pada penyelenggaraan pemerintahan, yang tidak dapat dilaksanakan secara penuh dan kecenderungan untuk berkantor di rumah kepala desa dengan jam kerja yang tidak terikat. Dari uraian tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa sumber pendapatan yang berasal dari tanah mempunyai pengaruh besar dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

b). Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat desa.

Swadaya dan partisipasi masyarakat desa disini dimaksudkan sumbangan warga desa dalam setiap kegiatan pembangunan. Dalam setiap kegiatan pembangunan desa atas dasar bantuan pembangunan desa diperlukan swadaya dan partisipasi masyarakat. Adapun bentuk swadaya dan partisipasi masyarakat desa adalah :

- a. Tenaga kerja di desa (manusia dan hewan).
- b. Substitusi tenaga kerja, yaitu penggantian tenaga kerja dinilai dengan uang.
- c. Bahan-bahan bangunan dan bahan makanan yang dapat dinilai dengan uang.
- d. Barang atau hasil bumi, yang sesuai dengan musyawarah dapat dilelang untuk dijadikan uang.
- e. Lain-lain (Drs. Suwignjo, 1985:209).

Swadaya dan partisipasi masyarakat tersebut di atas sangat penting artinya terutama dalam rangka pelaksanaan program bantuan desa, makin tinggi partisipasinya, berarti bahwa pembangunan yang diselenggarakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

c. Hasil dari gotong-royong Masyarakat Desa.

"Gotong-royong adalah bentuk kerja sama dan spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual (Drs. Suwignjo, 1985 : 209).

Dalam hubungan sumber pendapatan yang penting adalah gotong royong yang timbul akibat kerja sama antara warga desa dengan pemerintah desa. Hasil kerja sama itu misalnya dalam bentuk :

1. Jalan desa untuk memperlancar transportasi;
2. Tanaman peneduh jalan-jalan desa atau jalan-jalan lain dimana hasil tanaman menjadi milik desa sebagai sumber pendapatan desa;
3. Pembuatan kolam-kolam pembibitan ikan;
4. Pembuatan balai musyawarah;
5. Lapangan olah raga;
6. Kebun desa, dan sebagainya, (Drs. Suwignjo, 1985 : 210).

Bangunan tersebut merupakan hasil gotong royong yang dimanfaatkan oleh desa sebagai sumber pendapatan desa, baik dalam bentuk retribusi desa atau hasil penjualan atau penyewaan dan sebagainya.

d. Pungutan Desa.

"Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda dan atau barang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat desa, berdasarkan perkembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui keputusan desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa", (Drs. Suwignjo, 1985 : 210).

Keputusan desa baru berlaku setelah mendapat pengesahan Bupati Kepala Daerah. Jenis pungutan serta bentuk dan besarnya tidak sama bagi semua desa. Hal ini disebabkan kemampuan sosial ekonomi masyarakat yang berbeda. Jenis dan bentuk pungutan ditetapkan oleh pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan. Dengan ditetapkannya jenis-jenis dan bentuk pungutan, pemerintah desa akan mengetahui lebih lanjut besarnya pungutan yang akan dirumuskan dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Selanjutnya penarikan pungutan tersebut dilakukan oleh kepala desa atau perangkat desa yang dibantu oleh LKMD. Rencana pengalokasian dari hasil pungutan desa ditetapkan dalam Rencana Anggaran dari hasil pungutan desa ditetapkan dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (RAPPKD). Sehingga penggunaan dari pungutan menjadi lebih jelas dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lain selain yang ditetapkan dalam rencana pungutan tersebut.

e. Lain-lain pendapatan yang Sah

1. Lain-lain pendapatan yang sah pungutan yang berasal dari usaha-usaha desa, seperti lumbung desa perusahaan-perusahaan desa, dan sebagainya; Sesuai dengan prioritas pembangunan maka proyek bantuan desa disahkan pada bidang ekonomi. Selanjutnya dengan Inpres Bantuan Pembangunan Desa telah tumbuh dan berkembang usaha ekonomi desa seperti : penggilingan padi, peternakan dan perkebunan, perikanan laut dan darat, lumbung desa, kios desa, pembakaran kapur, pangkalan kendaraan, terminal desa, dan sebagainya. Usaha-usaha tersebut sangat bermanfaat bagi peningkatan sumber-sumber pendapatan desa, namun untuk kelangsungan kegiatan-kegiatan tersebut masih diperlukan pengelolaan yang cermat agar tidak merugikan atau tidak dimanfaatkan;
2. Permandian umum yang diurus oleh desa. Tidak semua desa mempunyai permandian umum dalam bentuk kolam renang, atau tempat bangunan lain yang diurus langsung oleh desa misalnya adanya sumber air hangat, atau sebagai pendapatan desa. Dalam perkembangan pembangunan sekarang, dimana desa mengalami kesulitan air bagi warganya, oleh desa dibangun bak-bak air atau jaringan yang masuk kerumah-rumah, setiap pemakai diwajibkan membayar sejumlah tertentu.
3. Pasar Desa
Pasar desa adalah pasar yang dibangun oleh desa. Pasar desa dapat merupakan sumber pendapatan desa dalam bentuk retribusi pasar. Selama ini pasar banyak yang dikuasai oleh pemerintah daerah Tingkat II sebagai sumber pendapatan daerah. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah tingkat II masih sangat diperlukan, masih belum maju menggali sumber-sumber lain, disamping itu sementara daerah tingkat II yang membagi retribusi tersebut 25% untuk Daerah Tingkat II dan 75% untuk desa. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, dimana pasar desa perlu diatur kembali agar ada keseragaman untuk seluruh Indonesia yang selanjutnya Pemerintah Daerah Tingkat II mengaturnya dalam bentuk Peraturan Daerah;
4. Sebagian dari biaya perdamaian atas persengketaan yang terjadi dikalangan warga desa yang penyelesaiannya diserahkan kepada Pemerintah Desa;

5. Sebagai hasil panen dari penduduk sawahnya yang memperoleh air dari saluran yang diurus oleh pemerintah desa (OPDA) di Nusa Tenggara Timur, Dharma Tirta di Jawa Tengah.
6. Sebagian dari uang saksi jual beli ternak besar atau tanah.
7. Obyek-obyek rekreasi diurus oleh desa, termasuk tempat-tempat keramat.
8. Bangunan milik desa yang dimanfaatkan oleh pihak lain (misalnya gedung, rumah, balai musyawarah desa).
9. Lain-lain kekayaan milik desa (kursi, lampu, alat pecah - belah dan sebagainya).

2. Sumber Pendapatan Desa yang Berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 ditetapkan bahwa sumber pendapatan desa yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. Sumbangan dan bantuan pemerintah daerah.
- b. Sumbangan dan bantuan pemerintah pusat.
- c. Sebagian dari pajak dan retribusi yang diserahkan kepada desa (Drs. Suwignjo, 1985 : 213).
 - a. Sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat yaitu :
 1. Tunjangan kurang penghasilan.

Sumbangan ini diberikan dengan anggapan bahwa aparat desa telah mempunyai pendapatan namun jumlahnya tidak memadai, sehingga perlu diberikan tambahan dalam bentuk tunjangan kurang penghasilan.

Tunjangan tersebut diberikan kepada :

- Kepala desa.
- Sekretaris desa.

- Kepala urusan yang berjumlah 3 sampai 5 orang

2. Bantuan pembangunan desa.

Untuk meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya pembangunan desa diberikan bantuan yang disebut Bantuan Pembangunan Desa. Bantuan tersebut diberikan sejak tahun 1965 terus menerus meningkat. Permulaan bantuan yang diberikan pada tahun 1969/1970 berjumlah Rp 100.000,-/desa, pada tahun 1983/1984 sebesar Rp 1.250.000,- dan tahun 1991/1992 yang berjalan sekarang ini sebesar Rp 3.500.000,-.

Proyek-proyek terdiri dari :

- Prasarana produksi.
- Prasarana perhubungan.
- Prasarana pemasaran.
- Prasarana sosial.
- Prasarana lain-lain.

Dalam perkembangan selanjutnya penggunaan bantuan desa diarahkan pada proyek-proyek yaitu :

- Skala prioritas disesuaikan dengan potensi desa dan masalah yang dihadapi.
- Benar-benar diperlukan masyarakat.
- Sesuai dengan kemampuan yang nyata dari swadaya masyarakat.
- Selesai dalam satu tahun anggaran.
- Dapat direncanakan, dilaksanakan dan diawasi

oleh tenaga LKMD yang ada di desa.

3. Hadiah Lomba Desa.

Diberikan kepada desa yang telah menunjukkan prestasi tinggi selama satu tahun. Besarnya hadiah lomba desa, juara tingkat Propinsi :

- Juara I sebesar Rp 5000.000,-
- Juara II sebesar Rp 4000.000,-
- Juara III sebesar Rp 3000.000,-

(Drs. Suwignjo, 1985 : 214).

4. Proyek Inpres (Instruksi Presiden).

Ada berbagai proyek Inpres yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa antara lain :

- Inpres sekolah Dasar.
- Inpres penghijauan.
- Inpres sanijaga (sanitasi lingkungan dan jamban keluarga).

5. Pembinaan Administrasi Desa.

Oleh pemerintah pusat (Departemen dalam Negeri) Kepala desa diberikan bantuan untuk peningkatan administrasi desa.

Bantuan Kepala Desa Kritis mendapat prioritas dalam pembangunan. Bagi desa-desa tersebut dapat merupakan sumber pendapatan yang bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan desa.

b. Sumber pendapatann dari pemerintah daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pembinaan terhadap desa menjadi tanggung-jawab pemerintah daerah Tingkat II. Dalam rangka meningkatkan desa untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan dan sumber keuangannya. Oleh karena itu dalam batas kemampuan Daerah kepada desa diberikan bantuan tertentu, antara lain :

1. Kepala desa diberi oleh pemerintah daerah sebagian pajak atau retribusi sebagai sumber keuangan desa. Macam/jenis pajak yang diberikan kepada desa ditetapkan oleh pemerintah Daerah yang bersangkutan, berdasar pada macam/jenis pajak yang menjadi wewenang Daerah.
 2. Bantuan terhadap kepala desa dan perangkatnya dalam bentuk tambahan tunjangan penghasilan.
 3. Bantuan untuk proyek-proyek desa, baik proyek bantuan desa atau proyek atas dasar swadaya murni masyarakat desa
- c. Sumber-sumber pendapatan dari pihak ketiga antara lain :
1. Pinjaman desa kepada Bank-bank.
 2. Kepemimpinan kepala desa, untuk menggerakkan pemborong-pemborong atau orang terpandang di desa untuk memberikan partisipasinya dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
 3. Sumbangan dari koperasi, dan lain-lain.

(Drs. Suwignjo, 1985 : 216).

D. Peningkatan Sumber-Sumber Pendapatan Desa.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, maka sumber pendapatan merupakan permasalahan yang mendasakan urgen yang memerlukan pemecahan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Bagi desa yang baru statusnya berubah menjadi kelurahan, maka pengelolaan sumber-sumber beralih menjadi wewenang pemerintah daerah Tingkat II. Selanjutnya berdasar azas tugas pembantuan pengelolaan sumber-sumber dilaksanakan Pemerintah Kelurahan, namun dari pada sumber-sumber tersebut merupakan pendapatan bagi daerah Tingkat II yang bersangkutan. Sedang bagi desa yang menyeleenggarakan rumah tangganya sendiri masalah yang dihadapi adalah

1. Penggalian sumber pendapatan bagi desa yang sebelumnya tidak mempunyai sumber pendapatan asli
2. Peningkatan sumber-sumber pendapatan bagi desa yang sudah mempunyai sumber-sumber pendapatan, namun masih belum berarti. (Drs. Suwignjo, : 1985: - 219).

Selanjutnya dalam rangka penggalian dan peningkatan atas sumber-sumber pendapatan desa, perlu dikemukakan hal-hal sebagai :

1. Penggalian sumber-sumber pendapatan asli desa.

Sebagaimana dikemukakan bahwa tidak semua desa mempunyai sumber pendapatan yang berasal dari kekayaan desa sendiri. Hal ini disebabkan :

- Sejak pembentukan desa tidak dilengkapi dengan sumber-sumber pendapatan.
- Hasil pemecahan dari desa lama menjadi beberapa desa baru dengan tidak disertai sumber pendapatan

Untuk mengetahui penggalian jenis-jenis pendapatan asli desa dapat dikemukakan sebagai berikut :

a). Kekayaan Desa.

Khusus yang menyangkut kekayaan desa, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena dari tanah dapat diperoleh hasil yang memadai, sebagai sumber pendapatan desa. Namun tidak semua desa mempunyai tanah. Dalam hal demikian maka desa tidak mempunyai sumber pendapatan dari tanah. Ini berarti bahwa desa menghadapi kesulitan untuk membiayai/memberi tunjangan kepada kepala desa dan perangkatnya lebih-lebih untuk kegiatan rutin maupun pembangunan. Dengan demikian tanah mempunyai peranan yang penting sebagai sumber pendapatan desa. Untuk itu maka tanah desa perlu diadakan. Dalam hubungan ini maka pengadaan tanah dapat dilakukan melalui :

1. Kebijakan pembelian tanah bagi desa oleh pemerintah daerah, terutama dipergunakan desa yang tidak mampu.
2. Pembelian tanah melalui kredit dari pemerintah, yaitu kredit berjangka panjang dan lunak.
3. Tanah milik negara, pengolahan pertama dengan menggunakan bantuan desa.
4. Bagi desa-desa yang cukup luas, sebagian tanah dapat dipergunakan sebagai sumber pendapatan. Perolehan tanah adat (ulayat) menjadi tanah desa di lakukan melalui musyawarah antara

antara Pemerintah Desa disatu pihak dengan tokoh adat dilain pihak. (Drs. Suwignjo, 1985 : 220).

b. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat Desa.

Apabila tanah tersebut tidak memungkinkan, keterbatasannya, maka sumber pendapatan dapat diperoleh melalui penggunaan swadaya partisipasi masyarakat, yaitu

1. Penggunaan gotong-royong masyarakat, namun tidak mengganggu kepentingan rakyat.
2. Substitusi gotong-royong berupa penggantian tenaga yang dinilai dengan uang bagi yang tidak hadir pada waktu itu yang ditetapkan sesuai dengan jadwal gotong-royong.
3. Sumbangan dari warga masyarakat desa dalam bentuk bahan hasil bumi dan lain-lain hasil musyawarah.
4. lain-lain yang dapat digolongkan swadaya partisipasi masyarakat. (Drs.Suwignjo, 1985:220).

c. Peningkatan Hasil Gotong-royong, antara lain :

1. Jalan Desa (retribusi bagi kendaraan besar yang masuk desa).
2. Penanaman pohon peneduh di pinggir jalan desa dan atau jalan yang di dalam pengawasan desa. Dengan tanaman produktif dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Penanaman tanah-tanah dengan sistem bagi hasil
4. Pemanfaatan hasil dari gerakan penghijauan.
5. Kolam-kolam pembibitan ikan.
6. Kebun bibit unggul dengan izin bimbingan Dinas Pertanian.
7. Balai musyawarah desa apabila dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
8. Bangunan desa.
9. Lapangan Olah Raga.
10. Tempat-tempat hiburan.
11. Tempat kramat yang ramai dikunjungi orang wisata).

d. Pungutan Desa.

Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun benda atau barang yang dilakukan oleh

pemerintah desa terhadap masyarakat desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa yang ditetapkan melalui keputusan desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Selanjutnya jenis pungutan yang merupakan sumber pendapatan ditetapkan dengan peraturan Daerah Tingkat I dan peraturan Daerah Tingkat II. Peraturan daerah yang mengatur pungutan pada sebagian besar daerah yang belum dilakukan merupakan pelaksanaan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982. Tentang Pungutan Desa. Namun pada beberapa desa telah melakukan pungutan sebagai sumber keuangan desa, dengan jenis pungutan sebagai berikut :

1. Pas jalan.
2. Keterangan berkelakuan baik.
3. Keterangan bebas G. S/PKI.
4. Keterangan Dukah.
5. Keterangan pemilikan tanah.
6. Keterangan penduduk sementara.
7. Kartu Penduduk.
8. Keterangan pindah.
9. Keterangan lahir.
10. Izin bangunan.
11. Izin keramaian.
12. Pengesahan surat-surat keterangan.
13. Sewa bangunan. (Drs.Suwignjo, 1985 : 222).

e. Usaha Yang Sah.

Usaha yang sah terutama diarahkan pada hasil proyek-proyek yang dibangun melalui Bantuan Pembangunan Desa. Banyak proyek yang telah dibangun namun belum memanfaatkan secara maksimal terutama untuk

peningkatan sumber-sumber pendapatan desa.

Proyek-proyek bantuan pembangunan desa yang dapat dimanfaatkan antara lain :

1. Parasarana produksi seperti ;
 - a. Pengairan desa.
 - b. Proyek peternakan.
 - c. Proyek pembibitan.
 - d. proyek listrik desa.
2. Prasarana pemasaran seperti :
 - a. Pasar desa.
 - b. Toko dan kios desa
 - c. Wisma dan penginapan desa.
3. Prasarana perhubungan seperti :
 - a. Retribusi terhadap jalan desa bagi kendaraan besar.
 - b. Jembatan penyeberangan desa.
 - c. Terminal dan pangkalan kendaraan.
4. Prasarana Sosial seperti :
 - a. Bangunan air bersih desa.
 - b. Gedung-gedung/bangunan untuk pertunjukan.
 (Drs. Suwignjo, 1985 : 223).

2. Penggalian Sumber-Sumber Pendapatan yang Berasal dari Pemerintah Pusat.

Sebagai mana disebutkan di atas sumber-sumber pendapatan desa yang berasal dari pemerintah Pusat dan Daerah, ada berbagai jenis, namun demikian sumber tersebut dapat digolongkan :

- 1). Sumber bantuan yang berbetuk proyek.
- 2). sumber yang non proyek, yaitu merupakan sebagian proyek dan retribusi yang diberikan kepada desa.

Sumber Pemerintah non proyek yaitu sesuai dengan fungsinya Pemerintah Daerah Tingkat II bertanggung jawab terhadap pembinaan penyelenggaraan terhadap pemerintah desa, maka pemerintah daerah berkewaji-

ban untuk memberi bantaun kepada desa. Bantuan tersebut dikaitkan dengan tugas pemerintah daerah yang harus dilaksanakan oleh desa misalnya tugas-tugas yang berhubungan dengan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Dalam hubungan ini sumber yang digali dari pemerintah tingkat lebih atas adalah :

1. Tambahan/subsidi/tunjangan/ganjaran kepala desa untuk tambahan biaya kepala desa dan perangkatnya dengan standar minimal penerimaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang kedudukan keuangan

kepala desa dan perangkatnya desa ditetapkan:

a. Kepala desa	Rp. 60.000,-
b. Sekretaris desa	Rp. 50.000,-
c. Kepala urusan	Rp. 40.000,-
d. Kepala urusan-	Rp. 40.000,-

 dapat terpenuhi.

2. Peningkatan sarana administrasi dalam bentuk penyeragaman register-register desa dan peralatan yang sudah diperoleh di desa.
(Drs. Suwignjo, 1985 : 225).

E. Struktur dan Mekanisme Anggaran Desa.

1. Struktur anggaran desa.

Pemahaman atas beban tugas yang diemban dalam mewujudkan misi yang ingin dicapai merupakan syarat mutlak untuk menyusun struktur anggaran yang tepat adan tuntas dan tidak terdapat celah-celah yang memungkinkan suatu kegiatan operasional tidak dapat dilaksanakan. Telah diketahui bahwa Pemerintah Desa/Kelurahan banyak dituntut untuk memenuhi keinginan-keinginan dan ketentuan masyarakat.

Keinginan dan kebutuhan merupakan pedoman atau pertimbangan dalam menyusun anggaran yang ditugaskan dalam kegiatan rutin dan pembangunan.

Dalam menyusun anggaran rutin dan pembangunan desa dijabarkan dalam bentuk anggaran yang berstruktur, artinya ada hubungan jalin-menjalin antara unsur-unsur atau kegiatan pembentuk struktur dan lingkup tugas dan fungsi satuan-satuan (unit organisasi pemerintah desa). Meskipun demikian dapat diperlihatkan dengan jelas antara kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Prinsip yang harus dipegang dalam menyusun anggaran adalah anggaran berimbang yang dinamis. Jumlah penerimaan dan pengeluaran sedapat mungkin seimbang namun lues apabila terjadi perubahan yang tidak dapat dihindarkan. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982, tentang penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) atau disingkat Anggaran Desa. Anggaran pengeluaran tersebut Anggaran Belanja Desa.

Anggaran belanja adalah suatu alat penting bagi pemerintah dalam rangka melaksanakan tugasnya baik kegiatan maupun pembangunan. Anggaran Belanja desa merupakan alat bagi Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, bukan saja merupakan kebijaksanaan kepala desa tetapi merupakan kebijaksanaan pemerintah desa karena kas lebih dahulu dimusyawarahkan dalam LKMD, dan selanjutnya mendapat pengesahan dari Bupati/Kepala

Daerah Tingkat II.

Struktur Anggaran Desa telah ditetapkan bedasar Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982, yang terdiri dari anggaran rutin dan Anggaran pembangunan yang masing-masing terpisah namun dalam satu kesatuan Anggaran. Anggaran rutin dapat dibagi dengan dua bagian yaitu : Bagian I mengenai penerimaan bagian ke II mengenai pengeluaran.

Adapun struktur anggaran sebagai berikut :

- a. Anggaran rutin mengenai penerimaan dibagi dalam tujuh Pos yaitu :
 1. Pos I, Sisa kurang perhitungan tahun lalu.
 2. Pos II, Pendapatan asli desa;
 3. Pos III, Penerimaan berasal dari bantuan Pemerintah Pusat;
 4. Pos IV, Penerimaan berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I;
 5. Pos V, Penerimaan berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II;
 6. Pos VI, Penerimaan berasal dari pajak dan retribusi yang diserahkan kepada desa;
 7. Pos VII, Lain-lain pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Anggaran rutin mengenai pengeluaran terdiri dari 6 Pos :
 1. Pos I, Sisa kurang perhitungan tahun lalu.
 2. Pos II, Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala urusan, kepala dusun, dan staf perangkat desa.
 3. Pos III, Pembiayaan alat tulis menulis kantor.
 4. Pos IV, Pembiayaan pendidikan milik desa.
 5. Pos V, Perjalanan dinas.
 6. Pos VI, Lain-lain (Drs. Suwignjo, 1985 : 236-237).

Sama halnya dengan anggaran rutin, anggaran pembangunan juga terdiri dari 2 bagian yaitu bagian peneri-

maan dan bagian pembangunan.

- a. Bagian anggaran penerimaan pembangunan terdiri dari 7 pos yang sama dengan pos-pos penerimaan rutin. Keadaan ini memerlukan penjelasan atau perincian lebih lanjut dan perlu perincian sumber-sumbernya.
- b. Bagian pengeluaran pembangunan terdiri dari 7 pos :
 1. Pos I, Sisa kurang perhitungan tahun lalu.
 2. Pos II, Pembangunan prasarana pemerintahan desa.
 3. Pos III, Pembangunan prasarana perhubungan.
 4. Pos IV, Pembangunan prasarana produksi.
 5. Pos V, Pembangunan prasarana pemasaran.
 6. Pos VI, Pembangunan prasarana sosial.
 7. Pos VII, Pembangunan laian-lain. (Drs. Suwignjo, 1985 : 237).

Pos-pos tersebut tampak bahwa penekanan pembangunan diarahkan pada aspek fisik dan menyangkut tata ruang. Hal ini kurang sesuai dengan perkembangan. Tidak dapat menampung program nasional yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat desa, khususnya menyangkut 8 sukses. Demikian pula program-program non fisik yang dirasakan oleh masyarakat.

2. Mekanisme Anggaran Desa.

- a. Anggaran desa disusun oleh pemerintah desa, besarnya sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran itu. Kegiatannya meliputi kegiatan rutin pembangunan. Jenis kegiatan rutin menyangkut masalah yang berhubungan dengan aparatur ketata usahaan, keuangan, perlengkapan, pemeliharaan rapat-rapat, dan hubungan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan menyangkut masalah berhubungan dengan edologi, politik, ekonomi so-

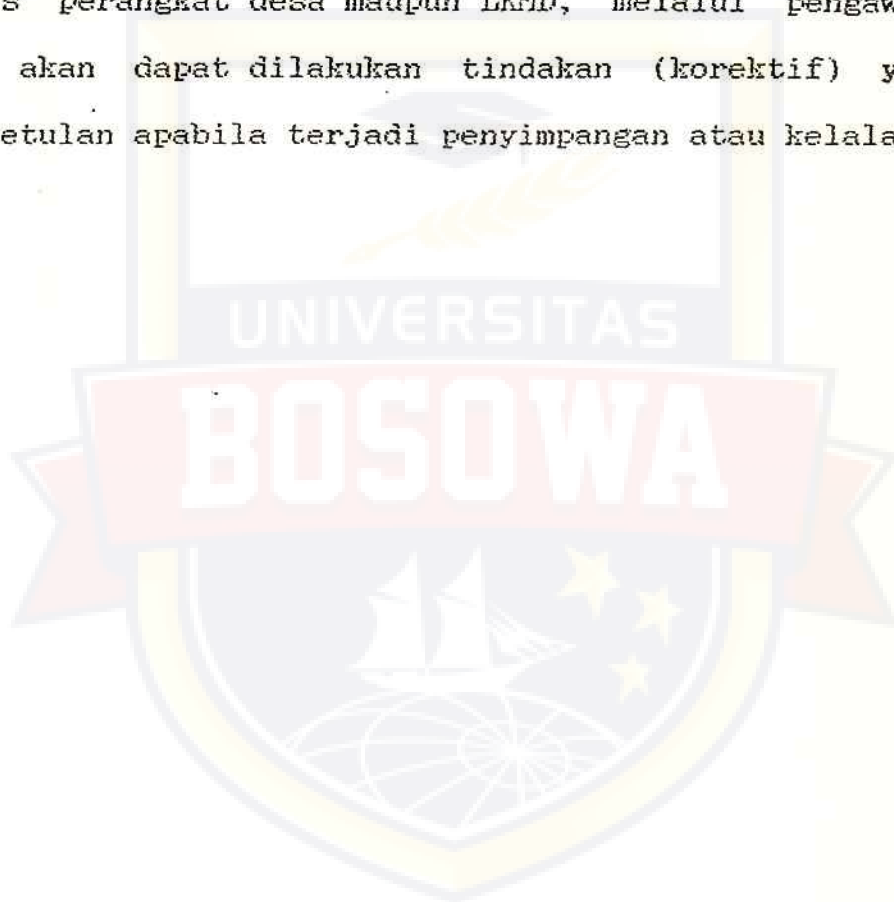
sial budaya dan ketenteraman dan ketertiban. Rencana-rencana kegiatan tersebut disusun oleh urusan-urusan bagi kegiatan rutin dan oleh LKMD, bagi kegiatan pembangunan sesuai dengan kegiatan 10 seksi LKMD.

b. Agar anggaran desa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga desa, sebelum penyusunan RAPPKD dilakukan oleh Kepala Desa, sesuai dengan adat setempat beserta LMD, LKMD dan perangkat desa. Masukan-masukan yang timbul, tumbuh dan berkembang merupakan bahan masukan dan penyusunan RAPPKD. Pada umumnya masalah yang dibahas dalam rapat adalah :

1. Sumber-sumber pendapatan desa (rutin dan pembangunan).
2. Anggaran belanja desa meliputi anggaran rutin dan pembangunan.
3. Masalah lain dalam bentuk informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat.

c. Anggaran desa merupakan batas kegiatan yang terencana dalam mencapai tujuan yang diinginkan yaitu dapat terwujudnya peningkatan kesejahteraan warga desa dalam suasana aman dan tenteram. Untuk menjamin agar tidak terjadi penyimpangan maka pengawasan perlu dilakukan terhadap jalannya pembangunan desa dengan mendeteksi struktur dan mekanisme anggaran. Pengawasan preventif pengesahan kepala desa. Pengawasan represif menekankan pemeriksaan dan penilaian fisik, posisi kas, kebenaran

administrasi dan keuangan, kelancaran pembiayaan dan penyimpangan prosedur. Kepala desa adalah penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sehubungan dengan itu maka kepala desa perlu secara build control pengawasan melihat terhadap tugas perangkat desa maupun LKMD, melalui pengawasan ini akan dapat dilakukan tindakan (korektif) yaitu pembetulan apabila terjadi penyimpangan atau kelalaian.



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Riwayat Singkat Tentang Wilayah Kecamatan Sinjai Selatan.

Adapun riwayat singkat Wilayah Kecamatan Sinjai Selatan sesuai dengan data yang penulis peroleh selama mengadakan research atau penelitian lapangan, maka dapatlah dikemukakan dengan susunan uraian-uraiannya.

Kecamatan Sinjai Selatan merupakan salah satu kecamatan diantara 5 Kecamatan di Daerah Tingkat II Sinjai dan terletak dibagian Selatan Kabupaten Sinjai, Sedangkan dasar pembentukan Kecamatan Sinjai Selatan dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu :

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara tertanggal 19 Desember 1961 Nomor 1100 tentang pembentukan Kecamatan di Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Sinjai.
- Surat Keputusan DPRD GR Daerah Tingkat II Sinjai Nomor 16 tahun 1961 yo. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sinjai 17 Maret 1962 nomor 5/KDS/62 tentang rencana pembangunan masyarakat Desa (Demokratisering Rekonstruksi Total) membagi habis 73 Wilayah Kampong Kompleks yang telah ada menjadi 38 buah desa Style baru.
- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Nomor 450/III/65 tentang pembentukan Desa gaya baru.

Adapun Wilayah-Wilayah bawahan Kecamatan Sinjai Selatan terdiri dari 1 (satu) Kelurahan dan 10 buah Desa

seperti yang tersebut dibawah ini :

1. Kelurahan Sangiasseri.
2. Desa Saotengah.
3. Desa Mannanti.
4. Desa Songing.
5. Desa Talle.
6. Desa Aska.
7. Desa Puncak.
8. Desa Palae.
9. Desa Bulukkamase.
10. Desa Kalobba.
11. Desa Tellulimpoe.

Inilah Kelurahan dan Desa tersebut di atas yang hingga sekarang ini belum ada perubahan.

Sumber : Muh. Hatta AP, SH., Kepala Wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, Wawancara pada tanggal 25 Pebruari Tahun 1991.

B. Geografi.

Letak dan Luas Wilayah.

Letak Wilayah Kecamatan Sinjai Selatan terletak dibagian selatan Kabupaten Sinjai dengan batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Sinjai Timur, dan Kecamatan Sinjai Tengah.
- Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Sinjai Timur.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Bulukumba.

- Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Sinjai Barat.

Kecamatan Sinjai Selatan dengan Ibu Kotanya Bikeru Kelurahan Sangiassei terletak di bagian Selatan Kabupaten Sinjai dengan jarak dari Ibu Kota Kabupaten Sinjai dengan jarak dari ibu Kota Kabupaten 25 km dan jarak dari Ibu Kota Propinsi Tingkat I Sulawesi Selatan sejauh sekitar 197 km, mengenai batas-batas Kecamatannya itu telah diuraikan di atas.

Luas Wilayah Kecamatan Sinjai Selatan seluruhnya 282, 45 km² dengan uraian sebagai berikut :

a. Penggunaan Tanah

Luas Wilayah Kecamatan Sinjai Selatan tersebut di atas itu dapat diperinci menurut penggunaan tanahnya dalam tabel sebagai berikut :

TABEL I
PENGUNAAN TANAH DI KECAMATAN SINJAI SELATAN

No.	Jenis Tanah	Luasnya
1.	Perumahan	2. 524,55 Ha
2.	S a w a h	4. 385 Ha
3.	Perkebunan Negara	1 Ha
4.	Perkebunan Rakyat	5. 722,65 Ha
5.	Tegalan	3. 246 Ha
6.	Lapangan	9. 925 Ha
7.	Hutan	1. 480 Ha
8.	Tanah Tandus	981 Ha
J u m l a h		28245,25 Ha

Sumber Data : Kantor Kecamatan Sinjai Selatan Tahun 1991.

b. Tingkat kesuburan tanah dan curah hujan/iklim.

1. Tingkat kesuburan tanah di daerah ini adalah termasuk produktifitas sedang, dengan kemampuan tanah antara 20-30 cm.

2. Curah hujan/iklim

Keadaan iklim dalam wilayah Kecamatan Sinjai Selatan adalah iklim basah dengan curah hujan antara 170-266/tahun.

Adapun bentuk permukaan tanah Kecamatan Sinjai Selatan adalah daratan dan berbukit-bukit, dalam wilayah Kecamatan ini meliputi :

Kelurahan Sangiasseri, desa Saotengah, desa Aska, desa Kalobba, desa Mannanti, dan desa Tellulimpoe adalah

daratan sedangkan desa Talle, desa Palae, desa Songing, desa Puncak, dan desa Bulukkamase adalah berbukit-bukit adapun prosentase tanah dan Wilayah Kecamatan Sinjai Selatan meliputi sebagai berikut :

TABEL II

KEADAAN TANAH DI KECAMATAN SINJAI SELATAN

No.	Jenis Tanah	Prosentase
1.	Daratan	76,43 %
2.	Perbukitan	23,56 %
3.	Jumlah	99,99 %

Sumber Data : Kantor Kecamatan Sinjai Selatan Tahun 1991.

Tumbuhan yang terdapat di Kecamatan Sinjai Selatan adalah kopi, kelapa, lada jagung, kacang-kacangan dan lain-lain. Sedangkan jenis binatang yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Sinjai Selatan adalah Kerbau, sapi, kuda, kambing, itik, dan ayam dan lain-lain.

C. Demografi.

1. Penduduk

Penduduk Kecamatan Sinjai Selatan terdiri dari 3 (tiga) suku bangsa yaitu : Suku Bugis, Suku Makassar, Suku Mandar dan Suku Bugislah yang merupakan bagian terbesar.

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan sensus tahun 1990 adalah sebanyak 59.730 jiwa yang terbesar pada 11

buah desa sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini

TABEL III
JUMLAH PENDUDUK SINJAI SELATAN TAHUN 1991

No.	Nama Kelurahan/Desa	Banyaknya Penduduk
1.	Sangiasseri	7. 257 jiwa
2.	Saotengah	6. 832 jiwa
3.	Mannanti	6. 461 jiwa
4.	Aska	6. 478 jiwa
5.	Talle	6. 201 jiwa
6.	Puncak	4. 945 jiwa
7.	Songing	6. 479 jiwa
8.	Tellulimpoe	4. 521 jiwa
9.	Kallobba	5. 213 jiwa
10.	Palae	5. 420 jiwa
11.	Eulukkamase	4. 617 jiwa
12.	J u m l a h	59. 730 jiwa

Sumber Data : Kantor Kecamatan Sinjai Selatan Tahun 1991

Seperti halnya dengan penduduk Kecamatan lainnya maka mata pencahariannya yang terbesar di Wilayah Kecamatan Sinjai Selatan adalah pertanian disamping lapangan-lapangan pekerjaan lainnya, yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikutnya :

TABEL IV
PERINCIAN MATA PENCAHARIAN
PENDUDUK KECAMATAN SINJAI SELATAN

No.	Mata Pencaharian	Prosentase
1.	P e t a n i	70 %
2.	N e l a y a n	20 %
3.	K a r y a w a n	10 %
4.	J u m l a h	100 %

Sumber Data: Kantor Kecamatan Sinjai Selatan Tahun 1991

2. Pendidikan

Mengenai keadaan pendidikan di Wilayahnya Kecamatan Sinjai Selatan dapat dilihat dengan angka Prosentase jumlah penduduk tamat SD/Madrasah sebanyak 0,54% dengan jumlah penduduk sebagai berikut :

TABEL V
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK
KECAMATAN SINJAI SELATAN

No.	S e k o l a h	Banyaknya
1.	Tidak pernah Sekolah/Tidak tamat Sekolah Dasar.	24.742
2.	Tamat SD Sederajat	27.170
3.	Tamat SLTP	1.160
4.	Tamat SLA	617
5.	Akademi	100
6.	Tamat Perguruan Tinggi Sederajat	19
7.	J u m l a h	53.808

Sumber Data: Kantor Kecamatan Sinjai Selatan Tahun 1991

Khususnya Agama Islam termasuk mempunyai jumlah penganut yang terbesar dan cukup baik perkembangannya di Wilayah Kecamatan Sinjai Selatan.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah sarana Ibadah yang banyak dan terbesar setiap kampung atau desa-desa dari daerah tersebut. Penduduk Kecamatan Sinjai Selatan pada umumnya termasuk umat Islam yang sangat patuh beribadah dan hidup dalam masyarakat berdasarkan kerukunan beragama, baik bersama umat Islam maupun agama-agama lainnya.

Selanjutnya mengenai jumlah rumah ibadah yang terbesar pada desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Sinjai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL VI
PRASARANA IBADAH KECAMATAN
SINJAI SELATAN

No	Nama Desa	Rumah Ibadah		Keterangan
		Mesjid	Gereja	
1.	Kelurahan Sangiasseri	7	1	
2.	Desa Saotengah	6	-	
3.	Desa Mannanti	6	-	
4.	Desa A s k a	5	-	
5.	Desa T a l l e	6	-	
6.	Desa Puncak	6	-	
7.	Desa Songing	7	-	
8.	Desa Tellulimpoe	4	-	
9.	Desa Kalobba	5	-	
10.	Desa P a l a e	6	-	
11.	Desa Bulukkamase	5	-	
12.	J u m l a h	59	1	

Sumber Data: Kantor Kecamatan Sinjai Selatan Tahun 1991

3. Adat Istiadat.

Adat Istiadat setiap masyarakat Desa dalam Wilayah Kecamatan Sinjai Selatan pada umumnya termasuk transisi upacara-upacara tradisional dan kebiasaan yang sifatnya boros dan memikat tidak lagi upacara syariat Agama Islam, seperti upacara perkawinan, upacara kelahiran, upacara kematian, upacara kehitanan dan lain-lain dilakukan secara sederhana, pada umumnya penduduk sudah

senang dengan adanya pembaharuan sedang pengaruh feodalisme itu sudah tidak ada lagi dalam kehidupan masyarakat.

Gotong-royong.

Semangat dan kesadaran masyarakat di desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Sinjai Selatan untuk melaksanakan pembangunan di desanya secara gotong-royong di desanya dari tahun ketahun demikian meningkat dan telah nampak dalam pembangunan di desa Kecamatan Sinjai Selatan utamanya dalam pembangunan prasarana desa hal ini terbukti mata nilai swadaya gotong-royong dalam pembangunan, dibanding dengan bantuan pemerintah baik bantuan pemerintah Tingkat II, Pemerintah Tingkat I, dan pemerintah pusat yaitu lebih besar dari 50 %.

D. Struktur Organisasi.

Sebelum diketengahkan struktur organisasi Kecamatan Sinjai Selatan terlebih dahulu dikemukakan pengertian organisasi menurut Drs. The Liang Gie sebagai berikut :

"Rangka yang menunjukkan segenap tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi tersebut, serta wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap anggota organisasi yang memikat tiap-tiap tugas pekerjaan itu. (Drs. Moelkijat :95)

Dari pengertian-pengertian tersebut suatu Organisasi akan berbeda yang satu dengan organisasi lainnya, perbedaan ini tidak saja sasaran yang akan dituju berbeda tetapi juga dari luas ruang lingkungnya. Artinya, kalau organisasi tugas pokoknya besar maka sasaran yang ingin dicapai tugas

luas hal ini otomatis struktur organisasi yang akan dibentuk juga besar dan sebaliknya kalau tugas pokoknya kecil maka organisasi yang disusun juga kecil.

Selanjutnya dikemukakan bahwa organisasi merupakan sebagai suatu sub konsep suatu tata keragaan sebagai suatu proses yaitu rangkaian kegiatan penataan yang berupa penyusunan suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan kerja sama dengan jalan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan, memberi tugas diantara para pejabat yang harus dilaksanakan, menetapkan wewenang dan tanggung jawab masing-masing serta menyusun jalin hubungan kerja diantara para pejabatnya.

Dengan melaksanakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa tata peragaan akan tercipta suatu kerangka kerja sama yang lazim disebut organisasi.

Organisasi merupakan tempat atau wadah bagi terlaksananya dan terhimpungnya orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu maka banyak sarjana yang telah memberikan pengertian organisasi menurut pandangannya masing-masing yang disesuaikan dengan keadaan dimana orang itu berada.

Adapun sarjana yang telah mengemukakan pengertian organisasi antara lain Prof.Dr.SP. Siagian yang merumuskan bahwa :

"Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan formal antara orang atau kelompok orang-orang yang disebut atasan atau management dengan orang atau sekelompok orang-orang lain yang disebut pelaksana. (Prof. Dr. SP Siagian, 1969 : 17).

Dengan adanya Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II dan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kecamatan, maka terbentuklah Kecamatan Sinjai Selatan yang membawahi satu Kelurahan dan 10 buah desa dari masing-masing Kelurahan/Desa membawahi beberapa kampung/lingkungan, RK dan RT.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah tersebut adalah berdasarkan pada suatu dasar yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut pada pasal 3 (1) dan (2) dikatakan bahwa :

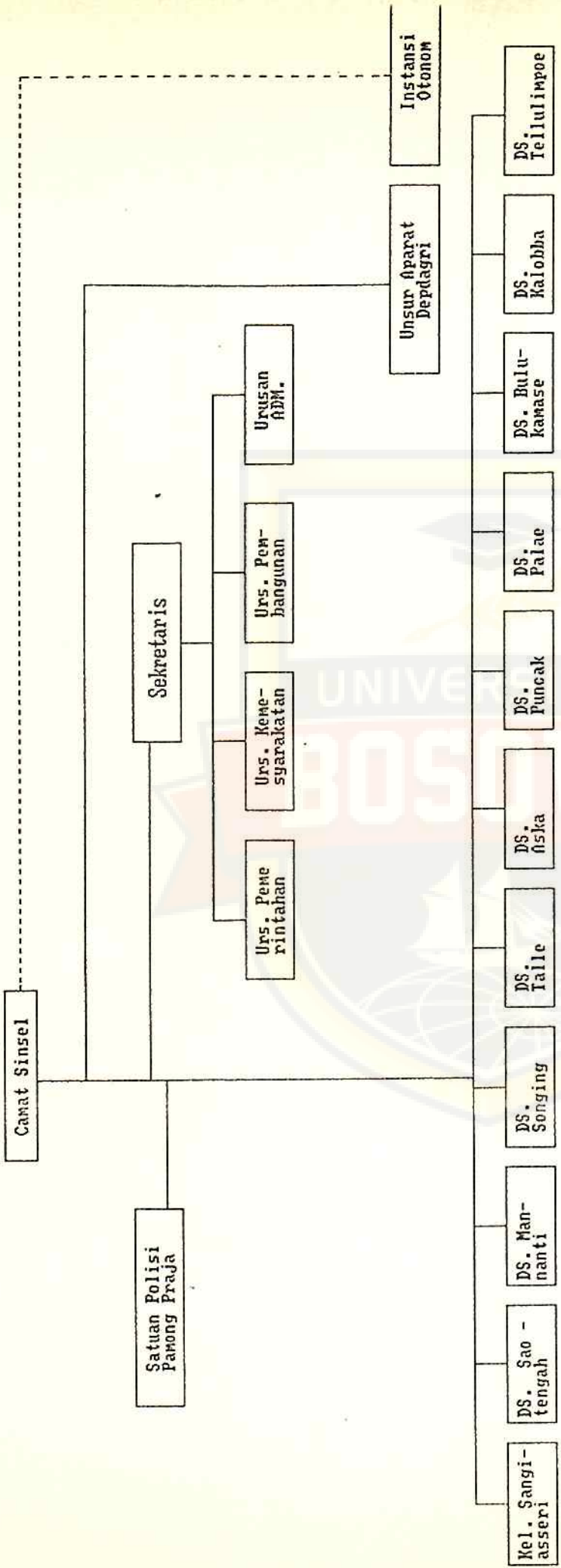
"Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 Dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibentuk Sekretariat Daerah dan Dinas-Dinas Daerah (Drs. Nurdin, E. Wantogia, 1974 : 6).

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dengan berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah ditetapkan bahwa pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Konstruksi yang demikian ini menjamin adanya kerja sama yang serasi antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk men-

capai setiap pemerintahan.

Dengan demikian maka dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ada pembagian tugas dan dalam kedudukan yang tinggi antar Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu Kepala Daerah memimpin bidang eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat bergerak dalam bidang Legislatif. Menurut Undang-Undang RI. No. 5 Tahun 1974, Pembuatan peraturan-peraturan daerah dilakukan bersama oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditanda tangani serta oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perlu pula ditegaskan bahwa walaupun Dewan Perwakilan Daerah adalah unsur Pemerintah Daerah tetapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak boleh mencapai bidang eksekutif tanpa mengurangi hak-haknya. Bidang eksekutif adalah wewenang dan tanggung jawab Kepala Daerah sepenuhnya.



- Camat : Muh. Hatta AP, SH
 Sekretaris : Bahar Paduppa BA
 Urus. Pener. : Mappisangka
 Urus. Kemasy. : Suamsuddin
 Urus. Pem. : M. Sultan
 Urus. Adh. : Abd. Fattah

- Keterangan :
 _____ : Garis Konando
 - - - - - : Garis Koordinasi

Sumber : Kantor Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai 1991

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Desa.

Seperti diketahui bersama bahwa sebelum melakukan suatu pekerjaan terlebih dahulu ditetapkan tujuan kemudian rencana untuk mencapai suatu tujuan itu.

Perencanaan merupakan suatu hal yang penting sebelum memulai suatu pekerjaan sebab dari perencanaan inilah kita bertolak untuk pelaksanaan, Untuk itulah dalam pengelolaan sumber pendapatan desa ini perlu direncanakan mengenai apa yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan desa, bagaimana pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, kapan waktu pelaksanaannya dan sebagainya. Dengan didahului suatu perencanaan yang matang, maka hasil yang akan diperoleh nanti akan memuaskan baik bagi pelaksanaan maupun bagi masyarakat, sebab dengan merencanakan terlebih dahulu berarti memikirkan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang.

Dalam perencanaan penentuan sumber-sumber pendapatan desa, masing-masing kepala desa dengan dibantu oleh sekretaris desa dan perangkatnya membuat konsep rencana sumber-sumber pendapatan desa, kemudian konsep ini diajukan dalam suatu rapat desa bersama (LMD) Lembaga Musyawarah Desa dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dalam rapat inilah konsep tersebut dibahas, setelah mendapat persetujuan dari rapat desa maka rencana tersebut sudah merubah menjadi keputusan

desa yang ditandatangani oleh kepala desa, sekretaris, dan Lembaga Musyawarah Desa kemudian di serahkan kepada Camat untuk diketahui dengan dilampiri daftar hadir anggota rapat dan risalah rapat.

Rapat desa untuk masing-masing desa tidak dilakukan secara bersamaan, tergantung dari desa masing-masing, tetapi dalam peraturan telah ditetapkan bahwa proses penetapan suatu keputusan yang menyangkut masalah anggaran ataupun pembiayaan dilakukan pada awal tahun anggaran yaitu pada bulan April setiap tahun.

Apabila konsep keputusan desa telah diterima dan diketahui oleh camat, maka konsep tersebut diserahkan kepada Eupati Kepala Daerah Tingkat II Sinjai untuk mendapatkan pengesahan. Proses pengesahan keputusan desa ini selambat-lambatnya 30 hari harus sudah mendapat pengesahan atau penolakan dari pejabat yang berwenang.

Keputusan desa yang telah mendapat pengesahan dari Bupati dikirim kembali kepada masing-masing desa melalui camat untuk dilaksanakan.

Setelah penulis melihat keputusan desa pada masing-masing desa yang dijadikan sample, ternyata dalam pembuatan konsep rencana keputusan desa pada umumnya sama, beberapa hal yang berbeda (tergantung dari banyaknya obyek di desa).

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa sumber-sumber pendapatan desa yang direncanakan akan di -

peroleh di Kecamatan Sinjai Selatan ada dua macam yaitu :

1. Pendapatan asli desa yang terdiri dari :
 - a. Hasil kekayaan desa yaitu tanah milik desa.
 - b. Swadaya masyarakat yaitu sumbangan cuma-cuma dari masyarakat.
 - c. Gotong-royong masyarakat desa yaitu pelaksanaan pembangunan oleh setiap masyarakat desa.
 - d. Pungutan resmi desa yaitu pengambilan surat-surat dikantor desa atau penggunaan jalan swadaya masyarakat desa.
 - e. Pendapatan laian-lain yaitu usaha-usaha ekonomi desa.
2. Sumbangan dan bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah Tingkat II yang terdiri dari :
 - a. Bantuan pembangunan desa yang bersumber dari APBN.
 - b. Pemberian dari pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II berupa tunjangan penghasilan bagi kepala desa dan perangkatnya.
 - c. Sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diserahkan kepada desa.
 - d. Bantuan Inpres berupa :
 - Bantuan penghijauan.
 - Bantuan sarana kesehatan (MCK).
 - Bantuan pasar desa.

Semua obyek di atas merupakan sumber pendapatan dari masing-masing desa untuk dilaksanakan sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan

yang ada di desa.

Pada tabel berikut ini kita melihat sumber pendapatan desa di Kecamatan Sinjai Selatan 1988/1989-89/90-90/91



No	Jenis Variabel	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Desa							
1.	Kekayaan Desa	550.000	220.000	2.550.000	820.000	1.675.000	980.000
2.	Swadaya masyarakat	1.000.000	720.000	1.550.000	1.200.000	1.550.000	900.000
3.	Gotong - royong	2.650.000	2.300.000	3.250.000	2.500.000	3.110.000	2.750.000
4.	Pengutan desa	1.000.000	600.000	1.375.000	925.000	1.600.000	900.000
5.	Lain - lain	500.000	355.000	1.075.000	800.000	1.250.000	675.000
J u m l a h		5.700.000	4.200.000	8.800.000	5.245.000	9.185.000	6.000.000
Bukan pendapatan asli desa							
1.	Bantuan pembangunan desa	9.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000	11.000.000	11.000.000
2.	Sumbangan dari pemerintah tingkat I dan II	7.500.000	7.500.000	7.920.000	7.920.000	9.120.000	9.120.000
3.	Sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diserahkan pada desa (upah pungut pajak)	800.000	725.000	1.000.000	850.000	1.250.000	1.250.000
4.	Bantuan Inpres : - Bantuan penghijauan (jambu mente) - Bantuan sarana kesehatan (MCK) - Bantuan pasar desa	2.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000	10.000.000	10.000.000
J u m l a h		23.000.000	23.725.000	30.000.000	30.000.000	51.370.000	51.370.000

Sumber data : Kantor Kecamatan Sinjai Selatan Tahun 1990/1991

Dari tabel tersebut dapat kita lihat penerimaan sumber-sumber pendapatan desa Kecamatan Sinjai Selatan mulai tahun 1988/1989-1989/1990-1990/1991 baik dari pendapatan asli desa maupun bukan pendapatan asli desa.

Dalam tabel tersebut sumber pendapatan asli desa yaitu secara garis besarnya dipungut 5 (lima) macam obyek pada tahun 1988/1989 yaitu kekayaan desa dengan target penerimaan Rp 550.000,- swadaya masyarakat dengan target penerimaan 1.000.000 gotong-royong dengan target penerimaan Rp 2.650.000,- pungutan desa dengan target penerimaan Rp.1.000.000,- dan pungutan lain-lain dengan target penerimaan Rp 500.000. Dengan melihat target penerimaan pada tahun 1988/1989 maka yang besar adalah hasil gotong-royong masyarakat desa. Hal ini memang wajar karena salah satu ciri masyarakat desa adalah nilai gotong-royong yang sangat tinggi. Adapun taraf penerimaan keseluruhan sumber pendapatan asli desa adalah Rp. 5.700.000.

Sumber-sumber pendapatan yang bukan pendapatan asli desa terdapat pula dalam tabel tersebut di atas untuk tahun 1988/1989. Adapun sumber penerimaan yang bukan pendapatan asli desa adalah bantuan pembangunan desa dengan target penerimaan Rp. 9.000.000,- sumbangan dari pemerintah dati I dan II dengan target penerimaan Rp. 7.500.000,- sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diserahkan pada desa (upah pungut pajak) dengan target penerimaan Rp 800.000,- kemudian Inpres yang terdiri dari

bantuan penghijauan dengan target Rp 2.500.000,- bantuan sarana kesehatan (MCK) dengan target penerimaan Rp 4.000.000,- adapun jumlah target keseluruhan yang bukan pendapatan asli desa adalah sebesar Rp 23.750.000.

Dalam tabel tersebut tampak realisasi sumber-sumber pendapatan asli desa maupun bukan pendapatan asli desa pada tahun 1988/1989. Adapun realisasi dari masing-masing sumber pendapatan adalah kekayaan desa dengan realisasi penerimaan Rp. 220.000 swadaya masyarakat dengan realisasi penerimaan Rp. 725.000, gotong-royong masyarakat desa dengan realisasi penerimaan Rp 2.650.000, pungutan resmi desa dengan realisasi penerimaan Rp 1.000.000, dan yang terakhir adalah pendapatan lain-lain desa dengan realisasi target penerimaan Rp.500.000. Adapun jumlah keseluruhan realisasi penerimaan adalah Rp 4.200.000,- sumber-sumber pendapatan tersebut adalah merupakan sumber pendapatan asli desa.

Dengan memperhatikan hal tersebut penulis dapat menjelaskan bahwa yang paling mendekati target penerimaan adalah gotong-royong masyarakat desa, kemudian swadaya masyarakat desa, lalu menyusul pungutan desa, kemudian pendapatan lain-lain dan terakhir adalah kekayaan desa.

Realisasi yang bukan sumber pendapatan asli desa terlihat dalam tabel tersebut sebelumnya untuk tahun 1988/1989 adapun realisasi dari masing-masing sumber pendapatan adalah bantuan pembangunan desa dengan realisasi penerima-

an Rp. 9.000.000,- sumbangan dari pemerintah dati I dan II dengan realisasi penerimaan Rp. 7.500.000,- sebagian dari pada dan retribusi daerah yang diserahkan pada desa (upah pungut pajak) dengan realisasi penerimaan Rp. 725.000 kemudian bantuan Inpres yang terdiri dari bantuan penghijauan dengan realisasi penerimaan Rp. 2.500.000, dan terakhir adalah bantuan sarana kesehatan dan realisasi penerimaan Rp. 4.000.000.

Berdasarkan uraian mengenai realisasi yang bukan pendapatan asli desa tersebut pada tahun 1988/1989 maka penulis dapat menjelaskan bahwa hampir semua yang bukan pendapatan asli desa dapat mencapai target. Hal memang wajar karena rata-rata sumber pendapatan tersebut merupakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah tidak melakukan lagi pengelolaan untuk memperolehnya.

Kemudian dengan memperhatikan pula bahwa penulis dapat membandingkan antara sumber pendapatan asli desa dan bukan pendapatan asli desa, maka yang paling tinggi penerimaannya adalah pendapatan yang bersumber dari yang bukan pendapatan asli desa.

Dari tabel VII tersebut sebelumnya dapat kita lihat pula dari sumber pendapatan desa tahun 1989/1990, sebagaimana tahun 1988/1989 secara garis besarnya sama dengan yang dikelola untuk tahun 1988/1989. Adapun sumber pendapatan tersebut adalah sumber pendapatan asli desa dan bukan pendapatan asli desa.

Pendapatan asli desa dalam tabel tersebut dikelolah 5 (lima) macam obyek sumber pendapatan asli desa yaitu kekayaan desa, dengan target penerimaan Rp.2.550.000, Swadaya masyarakat dengan target penerimaan Rp.1.550.000, gotong-royong masyarakat desa dengan target penerimaan Rp.3.250.000, pungutan resmi desa, dengan target penerimaan Rp 1.375.000, sedang pendapatan lain-lain dengan target penerimaan Rp 1.075.000,- Adapun jumlah keseluruhan target penerimaan untuk 5 (lima) macam obyek sumber pendapatan asli desa sebesar Rp 8.800.000.

Kemudian dalam tabel VII terdapat juga sumber pendapatan desa yang bukan sumber pendapatan asli desa untuk tahun 1989/1990. Adapun sumber pendapatan tersebut adalah bantuan pembangunan desa dengan target penerimaan Rp. 10.000.000,- sumbangan dari pemerintah tingkat I dan II dengan target penerimaan Rp 7.920.000, kemudian sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diserahkan pada desa (upah pungut pajak) dengan target penerimaan Rp 1.000.000, dan bantuan Inpres yang terdiri dari :

- Bantuan penghijauan (jambu mente) dengan target penerimaan Rp 3.500.000,-
- Bantuan pasar Inpres dengan target penerimaan Rp. 8.000.000,-.

Target penerimaan keseluruhan bukan pendapatan asli desa sebesar Rp 30.000.000.

Kemudian untuk realisasi masing-masing sumber perda-

patan desa pada tahun 1989/1990, juga dapat kita lihat pada tabel VII. Adapun realisasi untuk sumber pendapatan asli desa adalah sebagai berikut,kekayaan desa dengan realisasi penerimaan Rp 820.000, swadaya masyarakat desa dengan realisasi penerimaan Rp 1.200.000, kemudian gotongroyong masyarakat desa dengan realisasi penerimaan Rp. 2.500.000, pungutan resmi desa dengan realisasi penerimaan Rp 925.000, dan terakhir untuk sumber pendapatan asli desa adalah pendapatan lain-lain dengan realisasi penerimaan Rp 800.000,-.

Kemudian realisasi yang bukan pendapatan asli desa adalah bantuan pembangunan desa dengan realisasi penerimaan Rp 10.000.000, sumbangan dari pemerintah dati I dan II dengan realisasi penerimaan Rp 7.920.000, kemudian sumbangan sebagian dari pajak dan retribusi daerah (upah pungut pajak) dengan realisasi penerimaan Rp 850.000, kemudian bantuan Inpres yang terdiri dari :

- Bantuan penghijauan dengan realisasi penerimaan Rp 3.500.000.
- Bantuan pasar Inpres desa dengan realisasi penerimaan Rp 8.000.000,.

Adapun jumlah keseluruhan realisasi sumber pendapatan yang bukan pendapatan asli desa adalah sebesar Rp 30.000.000,.

Dengan melihat gambaran realisasi penerimaan sumber-sumber pendapatan asli desa pada tahun 1989/1990 maka penulis dapat mendekati target penerimaan adalah gotong-

royong masyarakat desa, kemudian swadaya masyarakat desa dan menyusul pungutan resmi desa, kekayaan desa dan terakhir adalah pendapatan lain-lain desa.

Untuk sumber-sumber pendapatan yang bukan pendapatan asli desa hampir semua mencapai target yang ditentukan.

Dengan melihat kedua gambaran realisasi sumber pendapatan tersebut maka penulis dapat menjelaskan bahwa tingkat penerimaan dari bukan pendapatan asli desa lebih tinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan asli desa. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli desa itu memerlukan pengelolaan lebih lanjut, sedangkan sumber pendapatan yang bukan pendapatan asli desa bisa langsung diterima dan tidak dikelola seperti sumber-sumber pendapatan asli desa.

Penerimaan sumber pendapatan desa baik pendapatan asli desa maupun bukan pendapatan asli pada tahun 1990/-1991 tampak dalam tabel VII tersebut di atas sebelumnya dan pada tahun tersebut dapat kita lihat target masing-masing sumber baik sumber pendapatan asli desa maupun bukan pendapatan asli desa.

Untuk sumber pendapatan asli desa tampak target masing-masing yaitu :

- Kekayaan desa dengan target penerimaan Rp 1.675.000,-
- Swadaya masyarakat desa dengan target penerimaan Rp 1.550.000,-
- Gotong-royong masyarakat desa dengan target penerimaan

Rp 3.110.000,- .

- Pungutan resmi desa dengan target penerimaan Rp 1.600.000
- Pendapatan lain-lain desa dengan target penerimaan Rp 1.250.000,-

Jadi target keseluruhan sumber pendapatan asli desa adalah Rp 9.850.000, .

Sedang target keseluruhan sumber pendapatan yang bukan pendapatan asli desa yaitu kita dapat melihat pada tabel VII tersebut diatas pada tahun 1990/1991. Adapun perincian sumber penerimaan pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Bantuan pembangunan desa dengan target penerimaannya Rp 11.000.000,-
- Sumbangan dari pemerintah dati I dan II dengan target penerimaan Rp 9.120.000,-
- Sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diserahkan desa (upah pungut pajak) dengan target penerimaan Rp 1.250.000, .

Adapun target keseluruhan yang bukan pendapatan asli desa adalah Rp 9.180.000, .

Berdasarkan uraian sumber pendapatan tersebut maka pendapatan asli desa, maka penulis dapat menjelaskan bahwa yang paling tinggi targetnya adalah gotong-royong masyarakat desa, kekayaan desa, swadaya masyarakat desa, pungutan desa dan yang paling kecil targetnya adalah pendapatan lain-lain desa.

Untuk yang bukan pendapatan asli desa yang paling tinggi targetnya adalah bantuan pembangunan desa, bantuan pemerintah daerah dati I dan II, dan target yang paling kecil targetnya adalah sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diserahkan pada desa (upah pungut pajak).

Pada tahun 1990/1991 dalam tabel VII kita dapat melihat pada masing-masing realisasi penerimaan sumber pendapatan asli desa dan bukan pendapatan asli desa. Adapun perincian realisasi pendapatan asli desa sebagai berikut :

- Kekayaan desa dengan realisasi penerimaan Rp 980.000,-
- Swadaya masyarakat desa dengan realisasi penerimaan Rp 900.000,-
- Gotong-royong masyarakat desa dengan realisasi penerimaan Rp 2.750.000,-
- Pungutan resmi desa dengan realisasi penerimaan adalah Rp 900.000,-
- Pendapatan lain-lain desa dengan realisasi penerimaan Rp 675.000,-

Adapun jumlah realisasi keseluruhan dari sumber pendapatan asli desa adalah Rp 6.205.000,.

Kemudian realisasi yang bukan sumber pendapatan asli desa adalah juga digambarkan dalam tabel VII tersebut adalah sebagai berikut :

- Bantuan pembangunan desa dengan realisasi penerimaan Rp 11.000.000,-

- Sumbangan dari pemerintah dati I dan II dengan realisasi penerimaan Rp 9.120.000,-
- Sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diserahkan pada desa (upah Pungut Pajak) dengan realisasi penerimaan Rp 1.250.000,-
- Bantuan Inpres penghijauan dengan realisasi penerimaan Rp 10.000.000,-

Adapun realisasi keseluruhan yang bukan pendapatan asli adalah Rp 31.245.000,.

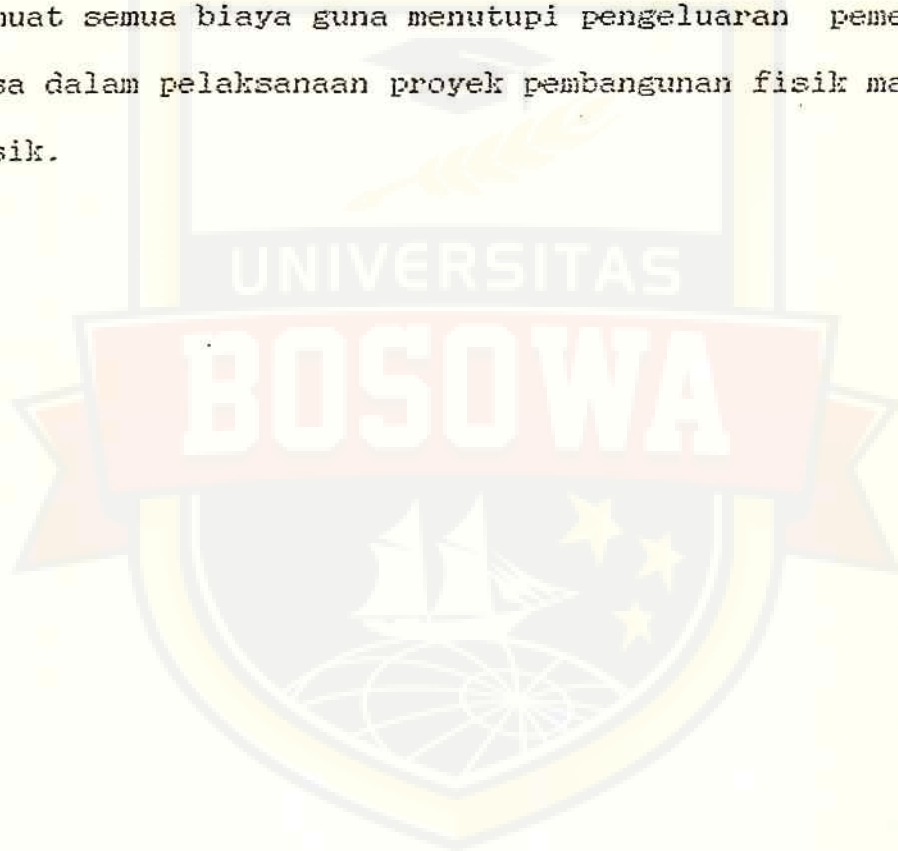
Dengan melihat uraian tersebut maka penulis dapat menjelaskan bahwa sumber penerimaan dari sumber pendapatan asli desa yang dapat mendakati target adalah gotong-royong masyarakat desa, menyusul berikutnya adalah swadaya masyarakat, kemudian menyusul berikutnya adalah sumber penerimaan yang dari pungutan resmi desa, dan yang paling kurang adalah pendapatan lain-lain desa, tetapi penerimaan sumber yang bukan pendapatan asli desa adalah semuanya dapat mencapai target dari penerimaannya yaitu tampak dengan jelas pada tabel VII tersebut di atas.

B. Pemanfaatan Sumber-Sumber Pendapatan Desa Dalam Pembangunan.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1982 dijelaskan bahwa penggunaan sumber-sumber pendapatan desa dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama bagi masyarakat desa.

Setiap tahun pemerintah desa selalu merencanakan

pemanfaatan sumber-sumber pendapatan desa untuk digunakan dalam membiayai segala kegiatan pembangunan di desa. Pemanfaatan pendapatan desa tersebut dituangkan dalam bentuk belanja rutin dan belanja pembangunan desa. Belanja rutin memuat pengeluaran desa digunakan dalam membiayai tugas pemerintah desa sehari-hari, sedang belanja pembangunan memuat semua biaya guna menutupi pengeluaran pemerintah desa dalam pelaksanaan proyek pembangunan fisik maupun non fisik.



TABEL VIII

DISTRIBUSI PENGELUARAN KEUANGAN DESA SAOTENGAH, KALOBBA
MANNANTI, TELULIMPOE KECAMATAN SINJAI SELATAN TAHUN
1988/1989

No.	Pengeluaran	Jumlah (Rp)	Prosen	Sumber Biaya
<u>Rutin</u>				
1.	Honor kepala desa dan perangkatnya	7.500.000	25,9	Bantuan pemerintah daerah tingkat I dan II
2.	Biaya administrasi desa	800.000	2,7	Pendapatan asli desa
3.	Biaya pemeliharaan	500.000	2,0	Pendapatan asli desa
4.	Biaya perjalanan dinas	800.000	2,7	Pendapatan asli desa
5.	Biaya lain-lain	800.000	2,7	Pendapatan asli desa
<u>Pembangunan</u>				
1.	Prasarana fisik pemerintah desa	5.000.000	17,2	Bantuan pusat + pendapatan asli desa
2.	Prasarana produksi	2.500.000	8,6	Bantuan Inpres
3.	Prasarana Perhubungan	3.000.000	10,3	Bantuan pusat
4.	Prasarana sosial	4.000.000	13,8	Bantuan Inpres
5.	Pembangunan lain-lain desa	2.925.000	10,1	Bantuan pusat
Jumlah		28.925.000	100,0	

Sumber Data : Kantor Camat Sinjai Selatan Tahun 1990/1991

Melihat tabel pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan di Kecamatan Sinjai Selatan tersebut, dapat dikatakan sebagai berikut :

- a. Pada pengeluaran rutin dapat kita lihat bahwa belanja atau honor kepala desa dan perangkatnya pengeluaran yang paling banyak yaitu 25,9% dan yang paling kecil adalah biaya pemeliharaan yaitu 2,0%. Besarnya pengeluaran masing-masing obyek diatas untuk setiap tahun tidak sama, terutama untuk obyek yang dananya berasal dari pendapatan asli desa, sebab kita ketahui bahwa pendapatan yang diperoleh desa tidak tetap, tergantung dari besarnya partisipasi masyarakat. Bahkan dalam satu tahun anggaran biasanya ada obyek yang tidak mendapat dana karena tidak diperoleh dari pendapatan asli desa.
- b. Pada pengeluaran pembangunan dapat kita lihat bahwa pengeluaran untuk pembangunan prasarana fisik pemerintah desa merupakan pengeluaran yang paling besar sebanyak 17,2% menyusul pembangunan prasarana sosial sebanyak 13,8 % kemudian pembangunan prasarana perhubungan sebanyak 10,3% dan pembangunan lain-lain sebanyak 10,1% dan yang paling kecil adalah sebanyak 8,6%.

Belanja pembangunan memang tidak sama dengan belanja rutin yang harus ada setiap tahun anggaran karena merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintah desa tapi juga bukan berarti bahwa pengeluaran untuk pembangun-

an yang tidak penting sebab bagaimanapun juga kita sebagai masyarakat selalu menghendaki adanya peningkatan kesejahteraan hidup, untuk itulah pembangunan perlu dilaksanakan apabila dana untuk itu tersedia.

Pembangunan yang sering dilaksanakan meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Adapun pembangunan fisik yang telah dilaksanakan di Kecamatan Sinjai Selatan berdasarkan penerimaan dari sumber pendapatan desa pada tahun anggaran 1988/1989 adalah pembangunan kantor desa, pembuatan balai pertemuan masyarakat, pos ronda, sedangkan pembangunan non fisik yang telah dilaksanakan adalah penyuluhan kesehatan, yang menyangkut kesehatan anak dan ibu, kemudian kegiatan lain yang sering dilaksanakan adalah pekan olahraga desa dan musabbahtilawatil quran.

Hasil pembangunan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Sinjai Selatan tidak hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat akan tetapi dinikmati secara merata oleh karena pembangunan yang dilaksanakan secara merata diberbagai desa atas dasar sistem skala prioritas yaitu bahwa proyek yang dibangun harus benar-benar diperlukan di dalam masyarakat.

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis pembangunan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Sinjai Selatan tahun 1988/1989 dapat kita lihat sebagai berikut :

1. Biaya dari Inpres desa yaitu berupa pembangunan prasarana produksi untuk semua desa berupa pembelian bibit

jambu mente dengan harapan agar hasilnya dapat menambah sumber pendapatan desa.

2. Biaya dari sumber pendapatan asli desa dari bantuan pusat dan bantuan Inpres yaitu :

a. Pembangunan prasarana fisik pemerintah yang terdiri dari :

- Pembangunan kantor desa yang terletak di desa Kalobba.
- Pembangunan empat buah pos ronda yang terletak di desa Kalobba dan desa Mannanti.
- Pembangunan balai pertemuan masyarakat desa yang terletak di desa Saotengah dan desa Teliulimpoe.

b. Pembangunan prasarana perhubungan yang terdiri dari :

- Pembuatan jalan kampung di desa Tellulimpoe dan Kalobba.
- Pembuatan dekker di desa Saotengah.

c. Pembangunan prasarana sosial yaitu bantuan sarana kesehatan berupa mandi cuci kakus (MCK) di desa Saotengah, Mannanti.

d. Pembangunan lain-lain yang terdiri dari :

- Pelaksanaan pendidikan kesejahteraan keluarga (PKK).
- Pelaksanaan musabakah TilawatilQuran.

TABEL IX

DISTRIBUSI PENGELUARAN KEUANGAN DESA SAOTENGAH, MANNANTI,
KALOBBA, TELJULIMPOE KECAMATAN SINJAI SELATAN
TAHUN. 1989/1990

No.	Pengeluaran	Jumlah (Rp)	Prosen	Sumber Biaya
1.	<u>Rutin</u> Honor kepala desa dan pe- rangkatnya	7.920.000	21,8	Bantuan pe- merintah dati I dan II
2.	Biaya adminis- trasi desa	1.000.000	2,7	Pendapatan asli desa
3.	Biaya pemeli- haraan	800.000	2,3	Pendapatan asli desa
4.	Biaya perjala- nan dinas	1.000.000	2,7	Pendapatan asli desa
5.	Biaya lain- lain	1.000.000	2,7	Pendapatan asli desa
	<u>Pembangunan</u>			
1.	Prasarana fi- sik pemerintah desa	8.000.000	22,3	Bantuan pu- sat + penda- apatan asli desa
2.	Prasarana pro- duksi	8.000.000	22,3	Bantuan Inpres
3.	Prasarana per- hubungan	2.500.000	6,8	Bantuan Inpres
4.	Prasarana sosial	3.750.000	10,3	Bantuan Inpres
5.	Pembangunan lain-lain	2.275.000	6,2	Bantuan pusat
	J u m l a h	36.245.000	100,0	

Sumber Data : Kantor Camat Sinjai Selatan Tahun 1991

Melihat tabel pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan di Kecamatan Sinjai Selatan pada tahun 1989/1990 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada pengeluaran rutin dapat kita lihat bahwa belanja atau honor kepala desa dan perangkatnya merupakan pengeluaran yang paling banyak yaitu 21,8 % dan yang paling kecil adalah biaya pemeliharaan yaitu 2,2 %.
- b. Pada pengeluaran pembangunan dapat kita lihat bahwa pengeluaran untuk prasarana fisik pemerintah desa dan prasarana produksi merupakan pengeluaran yang paling besar sebanyak 22,1% dan 21,1% menyusul juga pembangunan prasarana sosial sebanyak 10,3% kemudian prasarana perhubungan sebanyak 6,8% dan yang paling kecil adalah pembangunan lain-lain sebanyak 6,2%.

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis pembangunan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Sinjai Selatan tahun 1989/1990 dapat kita lihat sebagai berikut :

1. Biaya dari bantuan Inpres desa berupa pembangunan prasarana produksi berupa pasar Inpres untuk desa Saotengah dan desa Mannanti.
2. Biaya dari bantuan pusat pendapatan asli desa yaitu :
 - a. Pembangunan prasarana fisik pemerintah desa yang terdiri :
 - Pembangunan kantor desa di desa Tellulimpoe.
 - Pembangunan 6 (enam) buah pos ronda di desa Tellulimpoe dan desa Saotengah.

- Pembangunan kantor LKMD di desa Kalobba dan Tellulimpoe.
- b. Pembangunan prasarana perhubungan yang terdiri dari:
 - Pembuatan jalan dusun 2 (dua) km di desa Tellulimpoe.
 - Pembuatan jembatan 2 (dua) buah di desa Kalobba.
- c. Pembangunan pasar sosial dan pembangunan masjid 2 (dua) buah masing-masing di desa Tellulimpoe dan Kalobba.
- d. Pembangunan lain-lain yaitu kegiatan berupa :
 - Kegiatan penimbangan anak balita.
 - Penyuluhan masalah gizi.
 - Pekan olahraga desa dalam rangka menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus 1945.

TABEL X

DISTRIBUSI PENGELUARAN KEUANGAN DESA SAOTENGAH, KALOBBA
MANNANTI, TELULIMPOE KECAMATAN SINJAI SELATAN TAHUN
1990/1991

No.	Pengeluaran	Jumlah (Rp)	Prosen	
<u>Anggaran rutin</u>				
1.	Honor kepala desa dan perang - katnya	9.120.000	24,3	Bantuan pemerintah - daerah Tingkat I dan II
2.	Biaya administrasi desa	1.250.000	3,3	Pendapatan asli desa
3.	Biaya pemeliharaan	1.000.000	2,7	Pendapatan asli desa
4.	Biaya perjalanan dinas	1.250.000	3,3	Pendapatan asli desa
5.	Biaya lain-lain	1.500.000	4,0	Pendapatan asli desa
<u>Anggaran pembangunan</u>				
1.	Prasarana fisik pemerintah desa	6.000.000	16,9	Bantuan pusat
2.	Prasarana produksi	10.000.000	26,6	Bantuan Inpres
3.	Prasarana perhubungan	2.750.000	7,2	Pendapatan asli desa
4.	Prasarana sosial	4.000.000	10,6	Bantuan pusat
5.	Pembangunan lain-lain	3.455.000	9,1	Bantuan pusat
Jumlah		37.575.000	100,0	

Sumber data : Kantor Camat Sinjai Selatan Tahun 1991

Melihat tabel pengeluaran rutin dan pengeluaran pem-

bangunan di Kecamatan Sinjai Selatan tahun 1990/1991 dapat dikatakan sebagai berikut :

- a. Pada pengeluaran rutin dapat kita lihat bahwa belanja atau honor kepala desa dan perangkatnya merupakan pengeluaran yang paling banyak yaitu 24,2% dan yang paling kecil yaitu sebanyak 2,6%.
- b. Pada pengeluaran pembangunan dapat kita lihat bahwa pengeluaran untuk pembangunan prasarana produksi merupakan pengeluaran yang paling besar sebanyak 26,6% menyusul pembangunan prasarana fisik pemerintah desa sebanyak 15,9% kemudian pembangunan prasarana sosial sebanyak 10,6% dan pembangunan lain-lain pemerintah desa sebanyak 9,1% dan yang paling kecil adalah prasarana perhubungan sebanyak 7,2%.

Untuk lebih jelasnya mengenai jenis pembangunan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Sinjai Selatan 1990/1991 dapat kita jelaskan berikut ini :

1. Biaya dari Inpres pemerintah pusat berupa pembangunan prasarana produksi untuk semua desa berupa pembelian bibit kelapa hibrida.
2. Biaya bantuan pusat, pendapatan asli desa yaitu berupa:
 - a. Pembangunan prasarana fisik pemerintah desa yang terdiri dari :
 - Rehabilitasi pembangunan kantor desa yang terletak di desa Saotengah.
 - Rehabilitasi pembangunan kantor desa yang terletak

di desa Mannanti.

- Rehabilitasi kantor LKMD yang terletak di desa Mannanti
- Rehabilitasi balai pertemuan masyarakat di desa Kalobba.
- Pembangunan Kantor Pos Yandu di desa Tellulimpoe.

b. Pembangunan prasarana perhubungan yang terdiri dari:

- Perbaiki jalan desa masing-masing di desa Tellulimpoe.
- Pembuatan jembatan beton yang terletak di desa Mannanti.

c. Pembangunan prasarana sosial yang terdiri dari :

- Rehabilitasi mesjid yang terletak di desa Mannanti
- Pembangunan gedung sekolah Madrasah Ibtidayah yang terletak di desa Kalobba.
- Pembangunan gedung sekolah Shanawiyah yang terletak di desa Mannanti.
- Pembangunan kantor desa yang terletak di desa Saotengah.

d. Pembangunan lain-lain pemerintah desa yang terdiri dari :

- Pembinaan generasi muda yang terletak di desa Saotengah dan desa Mannanti.
- Pelaksanaan kegiatan Pendidikan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa Mannanti, Saotengah, dan desa Kalobba.

- Pekan olah raga desa (pordes) di desa Mannanti, Kalobba, Saotengah dan Tellulimpoe.
- Musabbakah Tilawatil-Quran yang terletak di desa Saotengah, dan desa Mannanti.

Pemanfaatan sumber-sumber pendapatan desa dari berbagai jenis pembangunan, dapat dipenuhi sebagian tetapi belum seluruhnya kebutuhan pembangunan tersebut yang tersedia baik bantuan pemerintah maupun pendapatan asli desa.

Pemanfaatan sumber-sumber pendapatan desa kita dapat melihat beberapa pendapat masyarakat/responden yang berhasil penulis wawancarai :

BUSOWA



TABEL XI

PEMANFAATAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA DIBIDANG PRASARANA FISIK DI DESA SAOTENGAH, MANNANTI, KALOBBA, TELLULIMPOE TAHUN 1990/1991

No.	Jenis kegiatan	Perkiraan Biaya (Rp)	Biaya Sebenarnya (Rp)
1.	Rehabilitasi pembangunan kantor desa Saotengah	1.250.000,-	1.250.000,-
2.	Rehabilitasi pembangunan kantor desa Mannanti	1.200.000,-	1.200.000,-
3.	Rehabilitasi kantor LKMD di desa Mannanti	1.400.000,-	1.400.000,-
4.	Rehabilitasi balai pertemuan masyarakat desa di desa Kalobba	1.250.000,-	1.250.000,-
5.	Pembuatan Pos ronda di desa Tellulimpoe	900.000,-	900.000,-
	J u m l a h	6.000.000,-	6.000.000,-

Sumber data : Dari responden yang telah diolah tahun 1991

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pemanfaatan sumber pendapatan desa dibidang prasarana fisik pemerintahan desa cukup baik berdasarkan pendapat responden yang mengatakan bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan ini hasilnya sesuai yang telah dilaksanakan (biaya yang dikeluarkan telah dimanfaatkan seluruhnya dengan baik).

Pemanfaatan sumber-sumber pendapatan desa dibidang prasarana sosial dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

TABEL XII

PEMANFAATAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA DIBIDANG PRA-SARANA SOSIAL DI DESA TELLULIMPOE, KALOBBA, SAOTENGAH
KECAMATAN SINJAI SELATAN TAHUN 1990/1991.

No.	Jenis Kegiatan	Perkiraan Biaya (Rp)	Biayaa sebenarnya (Rp)
1.	Rehabilitasi mesjid di desa Tellulimpoe	1.500.000,-	1.500.000,-
2.	Pembangunan sekolah madrasah di desa Kalobba	2.000.000,-	1.700.000,-
3.	Pembangunan pintu gerbang di desa Saotengah	500.000,-	500.000,-
J u m l a h		4.000.000,-	3.750.000,-

Sumber data : dari responden yang diolah tahun 1991.

Dari tabel tersebut di atas dapat kita lihat bahwa pemanfaatan sumber-sumber pendapatan asli desa tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya sesuai dengan perkiraan biaya semula dalam arti biaya yang telah dimanfaatkan terjadi adanya ketidak sesuaian antara perkiraan biaya dengan biayaa sebenarnya terutama pada pembangunan sekolah Madrasah yang terletak di desa Kalobba.

Pemanfaatan sumber-sumber pendapatan desa pada pembangunan lain-lain desa dan dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

TABEL XIII

PEMANFAATAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA PADA PEMBANGUNAN LAIN-LAIN DI DESA SAOTENGAH, MANNANTI, KALOBERA, DAN TELLU-LIMPOE DI KECAMATAN SINJAI SELATAN TAHUN 1990/1991.

No.	Jenis Kegiatan	Perkiraan Biaya (Rp)	Biaya Sebenarnya (Rp)
1.	Pembinaan generasi muda di desa Mannanti	200.000,-	150.000,-
2.	Pembinaan generasi muda di desa Saotengah	250.000,-	175.000,-
3.	Pelaksanaan kegiatan PKK di desa Mannanti	750.000,-	500.000,-
4.	Pekan olahraga desa di - desa Mannanti, Saotengah Tellulimpoe	1.155.000,-	1.155.000,-
5.	Musabbakah Tilawatil Qur-an di desa Saotengah dan desa Mannanti	1.100.000,-	1.100.000,-
	J u m l a h	3.455.000,-	3.075.000,-

Sumber data : Dari responden yang telah diolah tahun 1991

Dari tabel tersebut di atas dapat kita lihat bahwa pemanfaatan sumber-sumber pendapatan desa dibidang pembangunan lain-lain belum mencapai apa yang telah direncanakan ini dapat kita lihat pada perkiraan biaya dengan biaya yang sebenarnya terdapat ketidak sesuaian antara perkiraan biaya dengan biaya yang sebenarnya itu mungkin dipergunakan pada kegiatan dibidang pembangunan lain, tentunya juga pada pembinaan generasi muda pada Mannanti, dan desa Saotengah, begitu pula pada pelaksanaan PKK di desa Mannanti,

Saotengah, dan desa Kalobba.

Berdasarkan uraian di atas mengenai pemanfaatan sumber pendapatan desa dalam pembangunan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sumber pendapatan desa terutama sumber pendapatan yang bukan pendapatan asli desa seperti bantuan pembangunan desa, bantuan dari pemerintah daerah tingkat I dan II dan bantuan Inpres, sangat mendukung pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sinjai Selatan. Namun dalam pelaksanaan terhadap pembangunan tidak sesuai rencana semula terutama menyangkut pembiayaannya. Hal ini menurut pendapat penulis disebabkan karena pengawasan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sinjai Selatan kurang berjalan sebagaimana mestinya.

Kemudian penulis juga menyimpulkan bahwa berdasarkan tabel VII yaitu penerimaan sumber-sumber pendapatan desa di Kecamatan Sinjai Selatan mulai tahun 1988/1989-1990/1991. Tingkat penerimaan sumber-sumber asli desa sangat kurang dibandingkan dengan target yang ditentukan sebelumnya. Hanya secara umum bahwa yang sangat mendekati target penerimaan hanya bersumber pada gotong royong masyarakat desa. Berdasarkan hal ini maka penulis menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Sinjai Selatan terutama untuk pendapatan sangat tinggi.

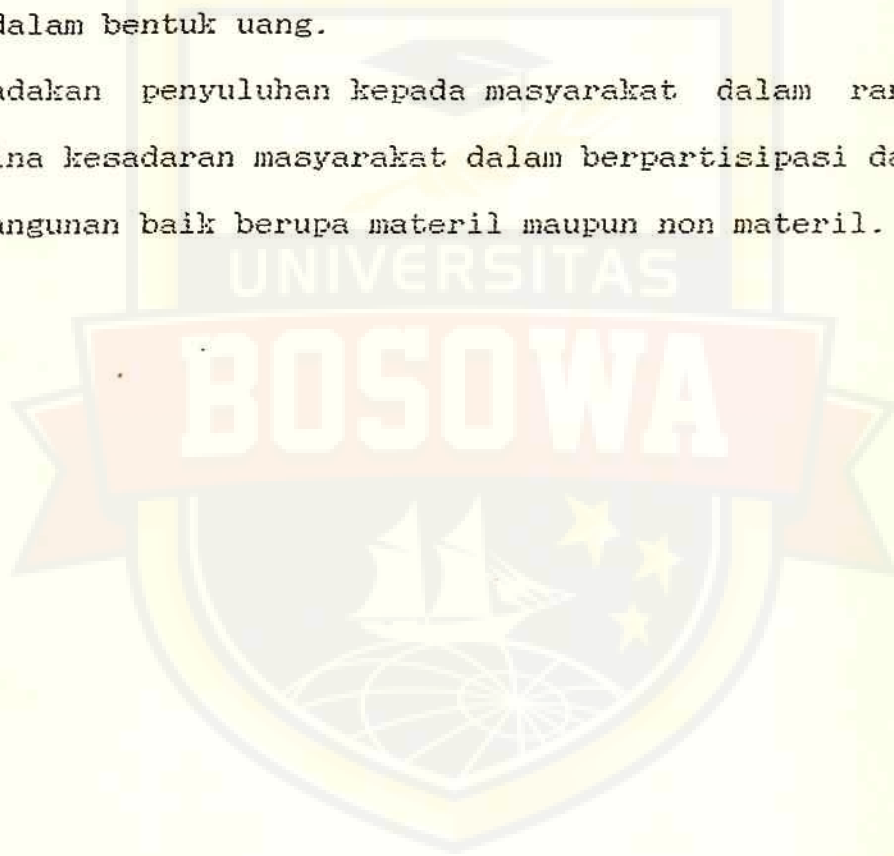
Begitu pula tingkat perbandingan antara sumber pendapatan asli desa maupun bukan pendapatan asli desa yaitu

mengenai target keseluruhan yang diterima, dimana target penerimaan sumber pendapatan asli desa kurang mendekati target, sedangkan bahwa pendapatan asli desa secara umum dapat dikatakan hampir setiap tahunnya mendekati target. Penyebab kurang tercapainya target sumber pendapatan asli desa karena kebanyakan masih banyak memerlukan pengelolaan lebih lanjut dalam arti harus memerlukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dan kadang tergantung pula kepada pendapatan keluarga suatu desa, sehingga mana kala pendapatan keluarga setiap desa menurun maka niscaya partisipasinya dalam pembangunan akan berkurang pula. Dibandingkan dengan yang bukan pendapatan asli desa hal itu tidak memerlukan tenaga atau modal yang lebih banyak karena merupakan sumber pendapatan yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini setiap desa menunggu saja setiap tahun anggaran yang bisa dikenal dengan APEN dan APBD baik pemerintah daerah tingkat I dan daerah tingkat II.

C. Usaha-Usaha Pemerintah Desa Untuk Menggali Sumber-Sumber Pendapatan Desa.

Usaha-usaha para kepala desa di Kecamatan Sinjai Selatan dalam menggali sumber-sumber pendapatan dengan memiliki cara yang berbeda, namun antara satu desa dengan yang lainnya mempunyai persamaan. Untuk mengetahui cara para kepala desa khususnya di Desa Saotengah, Mannanti, Kalobba dan Tellulimpoe, dalam menggali sumber pendapatan desa di bawah ini disimpulkan berikut ini :

1. Menambah tanah milik desa dengan jalan membeli lahan baik untuk persawahan maupun untuk perkebunan.
2. Mengadakan gotong-royong pembangunan seperti pembuatan jalan baru, pembuatan dekker, dan perbaikan mesjid.
3. Mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan pemerintah daerah tingkat II baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk uang.
4. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka membina kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan baik berupa materil maupun non materil.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan uraian tentang pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa disertai dengan permasalahan yang timbul dalam pengelolaan tersebut di Kecamatan Sinjai Selatan, penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa di Kecamatan Sinjai Selatan sudah cukup mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku baik perencanaan maupun pelaksanaannya sampai kepada pemanfaatannya dalam pembangunan, hanya saja waktu pelaksanaannya biasa berbeda dengan ketentuan yang berlaku, disebabkan oleh kualitas pelaksanaan administrasi pemerintahan desa yang masih tergolong rendah.
2. Melihat sumber-sumber pendapatan desa yang ada di Kecamatan Sinjai Selatan sekarang ini, maka dapat dikatakan bahwa sumber-sumber tersebut belum dapat menunjang pelaksanaan pembangunan di desa, sebab semakin hari kebutuhan masyarakat semakin bertambah banyak dan beraneka ragam sementara hasil sumber-sumber pendapatan desa semakin berkurang dan sulit untuk ditingkatkan.

Dengan melihat potensi sumber-sumber pendapatan desa yang ada di Kecamatan Sinjai Selatan, maka dapat dikatakan bahwa apabila sumber tersebut dapat digali dan dikelola dengan baik disertai partisipasi masyara-

kat dan unsur pengelola dapat lebih ditingkatkan kualitasnya maka sumber pendapatan desa dapat membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan.

Untuk menggali sumber-sumber pendapatan desa di Kecamatan Sinjai Selatan para kepala desa melaksanakan usaha-usaha tersebut dapat kita sebutkan berikut ini :

- a. Menambah tanah milik desa dengan jalan membeli lahan baik untuk lahan persawahan maupun untuk lahan perkebunan.
- b. Menyelenggarakan gotong-royong seperti pembuatan jalan baru, pembuatan dekker dan perbaikan mesjid.
- c. Mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah Daerah Tingkat II Sinjai baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk uang.
- d. Mengadakan pungutan jempitan rumah tangga setiap minggu (sumbangan beras setiap minggu).
- e. Kesadaran warga masyarakat kurang, begitu pula kualitas pelaksanaan administrasi pemerintahan desa masih kurang.

B. Saran-Saran.

Sebagai usaha untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa agar dapat mencapai hasil sebagai mana yang diharapkan, kiranya penulis dapat mengemukakan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Agar pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa berhasil

- dengan baik dalam arti hasilnya dapat dinikmati oleh semua masyarakat desa maka perlu adanya partisipasi masyarakat karena hal ini merupakan sumber pendapatan asli desa yang paling banyak diharapkan dapat menunjang terlaksananya pembangunan desa. Untuk itu disarankan pada masyarakat agar mau membantu pemerintah desa dengan jalan berpartisipasi terhadap program pemerintah, dan bagi masyarakat yang tingkat ekonominya lebih tinggi dapat mengerti tentang kedudukannya sebagai warga masyarakat yang harus mematuhi segala peraturan desa yang berlaku.
2. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam rangka memperkuat pemerintahan desa, perlu ^{semakin} makin diintensikan ^p usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang lebih banyak berkaitan dengan aspek administrasi bagi seluruh personil pemerintah desa melalui pendidikan dan latihan yang diselenggarakan baik ditingkat Kecamatan maupun ditingkat Kabupaten.

Selain dari itu pembinaan dan pengawasan terhadap desa-desa yang harus lebih teratur waktunya dan diharapkan dapat meningkatkan minat yang lebih besar dari personal pemerintah desa untuk memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kasus-kasus yang tidak diinginkan tidak terjadi.

3. Yang tidak kalah pentingnya dalam usaha meningkatkan pembangunan di desa adalah dilakukannya penelitian yang teratur oleh badan atau lembaga yang ditunjuk hal itu

untuk dapat memberikan gambaran dan rekomendasi atas hasil evaluasi untuk satu kurun waktu tertentu tentang perkembangan dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah desa merupakan organisasi pemerintahan terendah yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Demikianlah gambaran tentang pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa di Kecamatan Sinjai Selatan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi.

Namun masalah yang dikemukakan tersebut belum semuanya dapat diungkapkan sebab meskipun desa merupakan wilayah pemerintahan terendah namun, dalam melaksanakan aktivitas pemerintahan desa itu tidak mudah cukup banyak permasalahan yang dihadapi.

Masalah yang dihadapi oleh desa tersebut sebahagian telah diungkapkan oleh penulis melalui tulisan ini namun tidak menutup kemungkinan masih adanya permasalahan lain yang belum terungkap dan mungkin pada kesempatan lain masalah tersebut dapat diteliti lebih lanjut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU.

- Abdurachmat, Arifin. 1975. Kerangka Pokok-Pokok Managemen Umum Jakarta : Ichtiar Baru.
- Atmosudirjo, Prayudi. 1979. Dasar-Dasar Administrasi dan Managemen Umum, Jakarta : Seri Pustaka.
- Bayu Suriyaningrat, 1985. Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, Jakarta : Aksara Baru.
- Boediono B. 1969. Pajak Penjualan Suatu Pengantar, Jakarta : Ramaka.
- Hagual, Peter. 1985. Pembangunan Desa Swadaya Masyarakat, Jakarta : Rajawali Pers.
- Handyaningrat, Soewarno. 1982. Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta : Gunung Agung.
- Kansil, C. S. T. 1984 Desa Kita Dalam Tata Pemerintahan Desa Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Koentjaraningrat, 1989. Masyarakat Desa di Indonesia, Jakarta : Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ndaraha, Talisiduhu. 1984. Dimensi-Dimensi Pembangunan Desa, Jakarta : Eina Aksara.
- Praitno, Hadi. 1985. Pembangunan Ekonomi Pedesaan, Yogyakarta : Liberty.
- Siagian, H. 1985. Pokok-Pokok Pembangunan Desa, Bandung : Mandar Jaya.
- Soejita, Irwan. 1973. Peraturan Daerah, Jakarta : Institut Ilmu Pemerintahan.
- Soemitro, Rahmat. 1974. Pajak dan Pembangunan, Bandung-Jakarta : Eresco.
- Suwignjo, 1986. Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Suryadi, A. 1989. Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung : Mandar Jaya.